

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU PROPINSI RIAU

Fabillah Sandi

Pemerintah Kota Pekanbaru, Jl. Jend. Sudirman No. 464 Pekanbaru
Telp. (0761) 33000, 31543, 38765.

The Influence of Empowerment through Village Economic Institutional Development on Community Welfare at Rumbai Sub-district, Pekanbaru City, Riau Province

The research aims at studying the local efforts in improving community welfare and alleviating poverty in Pekanbaru City. One among other programs in alleviating poverty in Pekanbaru City is by providing grants to the village communities so that they are encouraged to actively participate in the development process. The grant is called Village Saving and Credit Services (UED-SP) for micro, small, and medium enterprises at the village level. The services should consider the local natural potentials and needs.

The objective of the program is to improve local economic development. The Village Economic Institutional Development program as a means to empowering people should put local people as the subject as well as the object all along the stages of development process.

Keywords: poverty, empowerment, welfare, Village Economic Institution

A. LATAR BELAKANG

Persoalan kemiskinan masih akan terus menjadi agenda penting di Indonesia. Kemiskinan telah menyebabkan jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai pemeliharaan kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, sehingga keluarga hanya mampu memenuhi seluruh kebutuhannya dengan serba keterbatasan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Persoalan kemiskinan tidak hanya terjadi di pedesaan, akan tetapi juga di perkotaan, bahkan kemiskinan perkotaan adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi sering kali dituding sebagai pemicu, diantara beberapa pemicu yang lain, perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi dan kemudian komunitas-komunitas kumuh atau daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota masih menyisakan berbagai persoalan yang harus disikapi dan dicermati secara arif. Apakah program-program tersebut bermanfaat

bagi pemberdayaan masyarakat, bukan sebaliknya menjadikan beban pembangunan yang tak habis-habisnya. Kecenderungan meningkatnya angka kemiskinan di berbagai daerah sebagai pengaruh dari krisis ekonomi, globalisasi dan persaingan yang semakin ketat harus dicarikan solusi yang tepat dan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa ini dari keterpurukan.

Kota Pekanbaru yang dulunya merupakan dusun kecil, namun berkat perkembangan dan kemajuan, Kota ini telah terbentuk dan menjelma menjadi satu Kota Besar dengan Luas Wilayah saat ini lebih kurang 632, 26 Km². Jumlah Penduduk Tahun 2006 sebesar 754.467 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,31%. Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 03 Tahun 2003 serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 04 Tahun 2003, dilakukan Pemekaran Kecamatan dari 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan dan 50 Kelurahan menjadi 58 Kelurahan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (2006; 297) pendapatan per kapita penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus-mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 pendapatan per kapita penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan harga konstan 2000 adalah Rp6.313.233,77,- pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp6.665.031,85. Pada tahun 2004 pendapatan per kapita meningkat lagi menjadi Rp7.154.004,37 dan menjadi Rp7.792.457,56,- pada tahun 2005.

Prinsip Pembangunan yang dianut dan dikembangkan dalam Pemerintah Kota Pekanbaru adalah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan kepada Visi Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2002, yang lengkapnya sebagai berikut: Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang berlandaskan Iman dan Takwa.

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru yang menurut data Statistik Kota Pekanbaru pada akhir Tahun 2005 telah mencapai 704.517 Jiwa. Pertambahan Jumlah Penduduk tersebut didorong oleh arus migrasi, karena besarnya harapan yang terlihat oleh pendaatang terhadap pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru. Dengan jumlah sebesar itu maka kepadatan penduduk Kota Pekanbaru saat ini adalah sebesar 1.139 jiwa/Km². Kepadatan penduduk ini menimbulkan masalah baru terutama dalam pelayanan, pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sebagai salah satu dampak negatif dari pertambahan Jumlah Penduduk adalah terjadinya peningkatan Jumlah Penduduk Miskin. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru setiap tahunnya juga menyebabkan jumlah keluarga miskin terus bertambah. Pada tahun 2006 berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga Kota Pekanbaru oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru, penduduk miskin telah berjumlah 76.841 jiwa atau sekitar 10,91 % dari total jumlah penduduk.

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru semestinya menjadi contoh yang baik bagi kota-kota lain diprovinsi Riau. Namun, sebagai kota yang kini sedang menuju metropolis, berbagai persoalan muncul. Mulai dari maraknya pedagang kaki lima (PKL), kependudukan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan lingkungan. Jika ditelaah lebih lanjut, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Daerah Perkotaan di Kota Pekanbaru cenderung meningkat. Hal ini dikenal dengan tiga faktor kritis yaitu cepatnya laju pertumbuhan penduduk, semakin sempitnya lahan pertanian produktif dan semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada sehingga menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan.

Dalam struktur kewenangan pemerintahan saat ini, ujung tombak penanggulangan kemiskinan adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat lebih berperan dalam proses fasilitasi dan asistensi guna mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan. Untuk

mewujudkan efektivitas Pemda dalam penanggulangan kemiskinan dengan dukungan aktif para pemangku kepentingan diperlukan perbaikan sistem koordinasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan merupakan forum lintas pelaku yang diharapkan berperan memwadahi semua upaya penanggulangan kemiskinan. Tim ini berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah diatur dengan Surat Mendagri Nomor: 412.6/2179/SJ Tahun 2006, perihal Panduan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan, program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Pekanbaru, dibentuk melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 98 Tahun 2006 dan terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari Walikota sebagai penanggung jawab; Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda sebagai pengarah; Wakil Walikota Sebagai Ketua dan Kepala Badan Pembangunan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) sebagai Ketua Pelaksana; dan Kabid Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), Usaha Ekonomi Menengah (UEM) dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana (BPMKB) sebagai Sekretaris.

Untuk melaksanakan program kerjanya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan membentuk empat Kelompok Kerja (pokja). Pemimpin atau anggota pokja unsur nonpemerintah terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga donor. Mulai Tahun 2006 Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Terpadu dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan melalui Pengentasan Kemiskinan Terpadu akan dipadukan Program-program sehingga secara efektif akan berdampak besar terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru dikelola oleh satuan kerja seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, dan Kimpraswil (Pekerjaan Umum). Koordinatornya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru menekankan pada tiga bina, yaitu bina manusia, bina lingkungan dan bina usahanya, pada upaya pengentasan kemiskinan ini.

Salah satu program dalam Pengentasan Kemiskinan Terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat Desa/Kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan dimaksud diberi nama Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) bagi usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa/kelurahan. Pemanfaatan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam harus memperhatikan potensi sumber daya alam di desa/kelurahan serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat (BPMKB, 2006: 12).

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat, yaitu kegiatan berupa Kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah kegiatan pembangunan yang sarat dengan muatan pemberdayaan masyarakat. Karena itu dalam kegiatan ini dituntut untuk menempatkan

masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sumber dana berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru pada tahun 2006 telah mengalokasikan dana Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sejumlah Rp1.000.000.000,- yang dialokasikan untuk 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Muara Fajar dan Kelurahan Umban Sari di Kecamatan Rumbai.

Dari pelaksanaan program tersebut diharapkan keadaan masyarakat yang pendapatannya rendah dan digolongkan miskin dapat diminimalisasikan, yang secara sederhana dapat dijelaskan (Panduan Program, 2006) sebagai berikut: (1) meningkatnya fungsi sarana sosial ekonomi masyarakat miskin; (2) terciptanya lapangan kerja; (3) meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat miskin; dan (4) tetap berputarnya roda ekonomi rakyat.

Sejalan dengan pendekatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, penulis mempunyai asumsi bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemberdayaan masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru perlu diteliti dalam hal: (a) Perguliran Dana Kegiatan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sangat menentukan perkembangan kesejahteraan dalam kelompok masyarakat peserta; (b) Kemampuan dan ketrampilan anggota kelompok masyarakat akan sangat berpengaruh dalam perkembangan dana Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan kesejahteraan masyarakat didalam kelompok masyarakat.; dan (c) Perkembangan modal dana kegiatan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dari kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekaligus pengentasan kemiskinan dikota Pekanbaru, agar kegiatan ini berjalan dengan baik adalah: Pertama, dibutuhkan komitmen para pelaksana kegiatan, mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai tingkat Pemerintah Kota. Kedua, diperlukan sebuah kajian yang menyeluruh mengenai potensi masyarakat, kondisi lingkungan dan kesiapan pendamping serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menjalankan kegiatan ini. Ketiga, mempersiapkan kegiatan yang dapat diterima dimasyarakat sehingga masyarakat dapat melihat bahwa kegiatan ini berasal dari masyarakat itu sendiri dan dilaksanakan untuk masyarakat. Keempat, kegiatan ini bukanlah sejenis charity (sumbangsih) saja, oleh sebab itu perlu dikelola secara ekonomis serta berkelanjutan. Kelima, diharapkan kegiatan ini memiliki signifikansi bagi para penerima bantuan dan dapat digulirkan kepada lingkungan yang lebih luas. (Panduan Program, 2006).

Tim kelompok kerja Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa: berdasarkan hasil survey, liputan media massa, masukan dan keluhan dari berbagai kelompok masyarakat, Tim Pokja berpendapat sebagai berikut: Pertama, tingkat pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru pada umumnya masih rendah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya sosialisasi dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan kepada masyarakat di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kedua, kegunaan langsung dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru bagi kelompok masyarakat miskin masih belum menunjukkan keberhasilan yang maksimal.

Ketiga, Pola perguliran belum dimiliki oleh kelompok, sehingga model perguliran sederhana sesuai dengan kesepakatan antara anggota kelompok masyarakat dengan pengelola kegiatan belum dikelola secara kesungguhan, ketekunan, keuletan oleh sebagian besar anggota kelompok masyarakat penerima bantuan modal, sehingga dapat berdampak terhadap penurunan modal dana kegiatan yang dimiliki kelompok masyarakat peserta, sehingga berdampak terhadap penurunan modal bantuan yang dimiliki.

Bilamana berpedoman dalam Panduan Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru Tahun 2006 telah ditegaskan bahwa dana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru merupakan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok dan disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada kelompok sesuai dengan persyaratan dan kondisi setempat dan kesepakatan anggota.

Sedangkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah: (1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, karena singkatnya waktu sosialisasi; (2) Penetapan jenis usaha masing-masing anggota kelompok masyarakat tidak atau belum sesuai dengan keahlian yang dimiliki; dan (3) Tidak atau belum adanya ketentuan sampai berapa lama tiap anggota kelompok masyarakat menggulirkan dana kegiatan tersebut.

Dengan memperhatikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pemerdayaan masyarakat, dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: "Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau".

Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau diduga karena kelompok masyarakat peserta sebagai kelompok sasaran belum memahami secara menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan dan belum adanya pola perguliran yang dimiliki oleh kelompok masyarakat peserta, sehingga model perguliran sederhana sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok masyarakat dan umumnya pengelolaan dana Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan belum dikelola secara kesungguhan, ketekunan dan dengan keuletan oleh sebagian anggota kelompok masyarakat peserta penerima dana, sehingga dapat berdampak terhadap penurunan modal yang dimiliki oleh kelompok masyarakat peserta. Dana Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat belum terencana secara baik, teratur dan terintegrasi secara matang.

B. LANDASAN TEORITIS

Berikut akan disajikan beberapa teori yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa teori yang penulis angkat dalam penelitian ini diantaranya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat, dan kemiskinan. Landasan teoritis kemungkinan ditindaklanjuti dengan analisis atas teori-teori tersebut yang dikaitkan dengan pemberdayaan.

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat

(*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (*community based development*). Kartasastima (1996: 144), menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian Kartasasmita (1997: 1) melanjutkan dengan mengatakan: "Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi".

Demokrasi ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata.

Sementara itu Chambers (Kartasasmita, 1997: 8) mengemukakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah: "Sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*". Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman, 1992 (Kartasasmita, 1997: 9) disebut *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*". Lebih lanjut menurut (Kartasasmita, 1997: 9) bahwa konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Donald Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai "*incompatible or antithetical*". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "*zero-sum game*" dan "*trade off*".

Bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), "*the pattern of growth is just as important as the rate of growth*". Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, "*the right kind of growth*", yakni bukan vertikal yang menghasilkan "*trickle-down*", seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni "*broadly based, employment intensive, and not compartmentalized*" (Ranis, 1995).

Pengalaman Taiwan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan dapat berjalan beriringan. Taiwan adalah salah satu negara dengan tingkat kesenjangan yang paling rendah ditinjau dengan berbagai ukuran (tahun 1987, Gini rasionya 0,30, termasuk yang terendah di dunia), tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi yang dapat dipeliharanya secara berkelanjutan (Brautigam, 1995). Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Kartasasmita, 1997: 9).

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman, 1992: (Kartasasmita, 1997: 10) menyatakan bahwa: "*The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and*

experiential social learning".

Ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya menggunakan tolok ukur ekonomi saja melainkan juga harus didukung oleh indikator-indikator sosial (non ekonomi), antara lain seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi-kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan akan kebutuhan perumahan. Selanjutnya menurut Todaro (2000: 31), terdapat tiga nilai inti dari pembangunan yaitu: (1) kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan; (2) jati diri, menjadi manusia seutuhnya, yaitu diartikan sebagai adanya dorongan-dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu; dan (3) kebebasan dari sikap menghamba, kemerdekaan atau kebebasan disini hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan.

Lebih lanjut Todaro (2000: 33) menyatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pendapat lain mengenai pemberdayaan dikemukakan oleh Blanchard (2001: 6) sebagai berikut: "*The real essence of empowerment comes from releasing the knowledge, experience, and motivational power that is already in people but is being severely underutilized*". Sedangkan (Harry Hikmat, 2001: 46-48) mengatakan bahwa: "Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri".

Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tapi juga kolektif. Pengertian ini kurang-lebih sama dengan pendapat Payne dan Shardlow mengenai tujuan pemberdayaan. Menurut Payne, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka, (Rukminto Adi, 2002: 162-163).

Menurut Pranarka dan Vindhyaandika (1996), terdapat dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat, yaitu: pertama, kecenderungan primer. Pada kecenderungan ini proses pemberdayaan masyarakat ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder. Kecenderungan ini menekankan pada proses pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog, (Adimiharja, 2001: 10).

Menurut Prasojo (2003: 13): "Proses pemberdayaan dapat mengalami percepatan melalui peran pemerintah daerah, karena kemampuan pemerintah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat ditingkat lokal (*local accountability*), kemudian pemerintah daerah dianggap mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat (*local responsiveness*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian

tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan (*movement*) untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBD atau APBN. Program dan kegiatan tersebut harus memiliki cara kerja (metode) yang efisien dan efektif untuk memobilisasi potensi dan mengurangi dispotensi yang ada di dalam masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* dan *community-based development* (Wrihatmolo dan Dwidjowijoto, 2007: 76). Dalam definisi formal, menurut PBB, *community development* adalah “.....a process whereby the efforts of Government are united with those of the people to improve the social, cultural and economic conditions in communities”. Adapun *community* dalam arti komunitas (Setiarso, 2007: 1) bermakna sebagai: (1) kelompok sosial yang bertempat tinggal dilokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama, dan (2) kesatuan pemukiman yang tersebutnya terdapat kota kecil/*town*, kota atau kota besar besar/*city*.

Esensi *community development* yang kemudian mengilhami model pembangunan yang berpusat pada rakyat, adalah upaya pemberdayaan (empowerment) terhadap rakyat berdasarkan ide-ide kemandirian, (Setiarso, 2007: 1).

Pengertian lain *Community Development* menurut Arthur Dunheim (Setiarso, 2007: 2) berarti usaha terorganisir untuk memperbaiki kondisi kehidupan komunitas dan peningkatan kemampuan berintegrasi dan berkembang secara mandiri. Sedangkan menurut Sumitro Maskun (Setiarso, 2007: 2): “*Community development* adalah program yang berusaha menjangkau masyarakat yang kondisi sosial ekonominya masih dalam keadaan relatif rendah dan sulit untuk berkehidupan memenuhi syarat kelayakan dan kesejahteraan”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin melalui upaya peningkatan kualitas manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pemantapan kelembagaan usaha bersama mereka. Semuanya ini dimaksudkan untuk menanggulangi situasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah merupakan pelaksanaan program pembangunan yang sarat dengan muatan pemberdayaan masyarakat. Karena itu dalam pelaksanaan kegiatan ini menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Pemberdayaan harus didasari pada asumsi, bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Semua proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga yang memiliki otoritas, (Prasojo, 2003: 14).

Menurut Prasojo, (2003: 14) untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan identifikasi hal-hal terkait seperti: kerjasama kelompok pelaku dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan klasifikasi lapisan kelompok

pemanfaat/sasaran baik secara ekonomi, sosial budaya dan politik. Sedangkan menurut Kartasasmita (1997: 11), pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sehingga pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan adalah, sebagai berikut: (1) Upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya; (2) Program harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya; dan (3) Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Disamping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan. Menurut Solihin (2007: 7), strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu: pertama, pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), yang meliputi: (a) pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum ditingkat nasional sampai desa, sehingga menjadi nilai inheren pada setiap tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat; (b) desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemecahan masalah; (c) peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam melayani penduduk miskin; dan (d) penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial, fasilitator juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan komunikasi yang setara dari penduduk miskin kepada pihak lainnya sehingga akses kepada penduduk miskin terbuka lebar.

Kedua, perluasan kesempatan (*promoting opportunity*), yang meliputi: (a) penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya dialokasikan kepada lapisan miskin; (b) pembangunan prasarana dan sarana fisik dibidang transportasi, komunikasi, perumahan, kesehatan, terutama untuk daerah-daerah tertinggal; dan (c) pemberian akses kepada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga budaya, terutama kepada keluarga miskin dan golongan perempuan, dengan demikian lapisan bawah dan kelompok marjinal memiliki modal untuk bersaing dalam kehidupan modern.

Ketiga, pengembangan perlindungan sosial (*enhancing social security*), yang terdiri dari: (a) pemberian legalitas kepada penduduk miskin agar bisa digunakan sebagai modal kerja dan perolehan kredit mikro/kecil; (b) pembentukan atau penguatan kelompok atau organisasi secara modern agar penduduk miskin dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan (c) pembangunan jaringan kerjasama antara individu, lembaga/kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan dan lembaga ekonomi, jaringan berguna untuk memperluas batas kemampuan individu atau kelompok serta sebagai pertahanan dari krisis yang mungkin menghadang secara mendadak.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah merupakan pelaksanaan kegiatan yang syarat dengan muatan pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin melalui upaya: peningkatan kualitas manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pematapan kelembagaan usaha bersama masyarakat, yang dilaksanakan di Kelurahan Muara Fajar dan Umban Sari di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Menurut Prasojo (2003: 14), strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat ditingkat kelurahan, adalah: pertama, memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subyek, baik sebagai pemeran utama dan atau ambil bagian/membantu ataupun sebagai sasaran/pemanfaat (obyek) secara tepat, benar dan dipahami serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pembangunan disegala bidang. Kedua, mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokratis, efektif dan efisien sesuai dengan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baku. Ketiga, memobilisasi sumberdaya manusia baik itu tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya, termasuk memobilisasi uang dan barang dan lain-lain baik secara lokal kelurahan ataupun dari luar kelurahan dan pihak lain seoptimal mungkin tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Keempat, memaksimalkan peran pemerintah, khususnya pemerintahan kelurahan dalam memfasilitasi, mengatur/legalisasi (regulasi) dan memberi bantuan dana teknis (donasi) guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan/ pemberdayaan masyarakat.

Konsep-konsep Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat sebagai jembatan antara pembangunan mikro dan makro yaitu Pemberdayaan Masyarakat, adalah merupakan sebuah proses usaha-usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi sosial, kultural dan ekonomi masyarakat, (Syahuti, 2006: 47). Sehubungan dengan diperlukannya sebuah proses usaha-usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat maka terjadi perubahan dimana terjadinya pergerakan dari suatu masyarakat industrial (*industrial society*) ke suatu masyarakat pengetahuan (*knowledge society*), dimana sumber kekayaan bergeser dari modal kepengetahuan dan jenis organisasi (*organizational type*) dari hierarki yang tajam (*steep hierarchy*) menuju ke jejaringan manusia (*human networking*).

3. Kemiskinan

Kartasmita (1997: 234) mengatakan bahwa: "Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi". Sedangkan menurut Kadir (1993: 5), kemiskinan adalah: "Situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Hal ini disebabkan terbatasnya modal yang mereka miliki dan rendahnya pendapatan mereka. Sehingga akan mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan". Adapun menurut World Health Organization, (World Bank, 1995), kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang, di mana pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Kemiskinan juga dapat dikatakan timbul karena pendapatan yang rendah, namun demikian ada negara yang pendapatan per kapitanya cukup tinggi akan tetapi

tingkat kemiskinannya juga tinggi. Hal ini dimungkinkan karena distribusi pendapatannya kurang merata.

Sedangkan yang dimaksud dengan golongan miskin menurut Mubyarto (1990: 159) adalah sebagai berikut: "Golongan miskin adalah golongan yang rawan pangan yang berpengaruh negatif terhadap produktifitas kerja dan angka kematian balita". Kemudian Salim (1984: 61), mendefinisikan golongan miskin sebagai berikut: "Golongan miskin adalah mereka yang berpendapatan rendah karena rendahnya produktifitas, di mana rendahnya tingkat produktifitas disebabkan karena tidak memiliki aset produksi dan lemah jasmani dan rohani".

Beberapa pakar mencoba menelusuri bentuk-bentuk dan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Menurut Baswir (1997: 23) dan Sumodiningrat, (1998: 90), secara sosio-ekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu: pertama, kemiskinan absolut, yaitu suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain. Kedua, kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.

Menurut Kartasasmita (1996: 235), Sumodiningrat (1998: 67), dan Baswir (1997: 23), terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan), sebagai berikut: pertama, kemiskinan natural yaitu keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997: 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996: 235) disebut sebagai '*persisten poverty*' yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

Kedua, kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (1997: 21) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.

Ketiga, **kemiskinan struktural** yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997: 21). Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga

menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Kartasasmita (1996: 236) hal ini disebut "accidental poverty", yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Masalah-masalah kemiskinan tersebut menurut Nurkse (Sumodiningrat. 1999: 150) sebagai suatu 'lingkaran setan kemiskinan' yang meliputi enam unsur, yaitu: keterbelakangan, kekurangan modal, investasi rendah, tabungan rendah, pendapatan rendah, dan produksi rendah. Lain halnya dengan pendapat Chambers yang mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan terdiri dari lima unsur yaitu: kemiskinan, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling kait mengait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi (Chambers, 1983: 145-147).

Seseorang tidak dapat dikatakan miskin jika tidak sejalan dengan indikator-indikator kemiskinan. Dalam kaitannya dengan indikator kemiskinan, Sayogyo (1971) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita, membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah perdesaan dan perkotaan (Cahyat, 2004: 1). Untuk daerah perdesaan apabila seseorang hanya mampu mengkonsumsi setara ekuivalen konsumsi beras sampai dengan 240 kg/orang/tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, dan untuk keluarga yang tergolong melarat apabila kemampuannya setara dengan ekuivalen konsumsi beras 180 kg/orang/tahun. Daerah perkotaan dikatakan sangat miskin bila kemampuannya setara ekuivalen konsumsi beras 360 kg/orang/tahun. Sementara itu, BPS (1994) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan, kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari, pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang jasa. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin (Kuncoro, 2004:142-143).

Berbeda dengan BPS, BKKBN melakukan pengukuran tingkat kesejahteraan dengan menjadikan keluarga sebagai unit survai. Pendataan keluarga dilakukan setiap tahun, menghasilkan data jumlah keluarga menurut tahapan atau tingkat keluarga sejahtera yang terdiri atas 5 kategori, yaitu Prasejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus. Keluarga Prasejahtera diartikan sebagai keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti ibadah agama, pangan, sandang, papan dan sejahtera. Masuk dalam kategori Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tapi belum mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya, yakni penidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Sementara itu Keluarga Sejahtera adalah yang tergolong telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum mampu memenuhi kebutuhanpengembangannya, seperti kebutuhan menabung dan memperoleh informasi. Mereka yang tergolong dalam Keluarga Sejahtera III adalah yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan keluarga, tetapi belum dapat secara teratur dan aktif memberikan sumbangan materi dan melakukan kegiatan kemasyarakatan. Adapun keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan yakni dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan untuk berpartisipasi dalam aktifitas kemasyarakatan digolongkan kedalam Keluarga Sejahtera III Plus.

Data Keluarga versi BKKBN inilah yang juga menjadi acuan bagi pengelola Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dalam upaya Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru, dengan menggunakan konsep Pemberdayaan Keluarga.

Adapun dasar kriteria atau indikator penentuan penduduk miskin adalah: "Luas lantai kurang dari 8 meter, jenis lantai tanah, dinding rumah kayu atau bambu, tidak memiliki fasilitas MCK, sumber air minum bukan PDAM, penerangan bukan listrik, membeli daging maksimal 1 kali sepekan, frekuensi makan dua kali sehari, 1 tahun membeli 1 stel pakaian, tidak mampu berobat ke Puskesmas, lapangan pekerjaan buruh tani- buruh bangunan dan lainnya, pendapatan di bawah Rp. 600 Ribu per bulan, pendidikan tertinggi tidak tamat sekolah dan tidak tamat SD, tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual nilainya tidak sampai Rp. 500 Ribu, tidak memiliki kompor atau menggunakan arang".

4. Pengentasan Kemiskinan dengan Pemberdayaan

Penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah menurut Sulekale (2003:7) adalah: "Memberikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri, dan mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat yang bersifat *top-down* menjadi partisipatif, dengan bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya lokal". Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bird dan Rodriguez (1999: 305) sebagai berikut: "*The relationship between decentralization and poverty alleviation depends on the targeting of poverty-reducing public investment by local governments*".

Pengentasan Kemiskinan dengan Pemberdayaan bersandarkan pada peran pasar dalam alokasi sumberdaya (Kartasasmita, 1996 : 150) akan tetapi dalam prakteknya selalu terjadi kesenjangan antara pertumbuhan dan pemerataan, oleh karena itu diperlukan intervensi yang tepat dalam proses pembangunan. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai "jembatan" bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

Pemberdayaan terkait dengan 'semangat kerakyatan', strategi pemberdayaan masyarakat adalah berupa peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan itu mencakup: 1) partisipasi, dan 2) demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan: 'perubahan struktural' secara alamiah, dimana yang menghasilkan yang menikmati dan sebaliknya yang menikmati harus pula menghasilkan (Kartasasmita, 1996 : 140-149).

Pada proses pembangunan dimana interaksi yang ideal antara tiga pihak, yaitu pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil (*civil society*), terjadi maka dasar bagi terjadinya pemberdayaan masyarakat dapat dicapai. Dari sisi praktis, pemberdayaan merupakan sebuah proses, yang dalam tingkat tertentu mencakup pengembangan pribadi dan juga mencakup tindakan yang nyata bukan sekedar hanya pemikiran.

Dalam kaitannya dengan perguliran dana mikro-kredit, secara praktis, dapat diformulasikan indikator berhasil atau tidaknya pola perguliran dana yang dilakukan, yang mencakup ciri-ciri sebagai berikut (Sumodiningrat, 2001): (1) Transparansi (*transparency*), artinya semua yang terlibat dalam proses tersebut dapat mengetahui perkembangan keuangan yang digulirkan; (2) Bertanggungjawab (*accountable*), artinya perguliran dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan masyarakat juga mempunyai kontrol atas pengelolaan perguliran yang dilaksanakan; (3) Menguntungkan (*profitable*), artinya semua yang terlibat dapat memperoleh manfaat, khususnya keuntungan materi; (4) Berlanjut (*sustainable*), artinya proses tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang; (5) Dapat diperluas (*replicable*), artinya pola yang dilakukan dapat dijadikan contoh bagi pihak lain; (6) Skala (*scale*), artinya ada luasan target tertentu, apakah dalam bentuk daerah atau wilayah atau lainnya, yang dijadikan sasaran bagi pola perguliran; dan (7) Efektivitas (*cost effectiveness*), artinya pengelolaan dilakukan dengan biaya yang rendah.

Dari ke delapan formulasi unsur tersebut, maka tiga ciri yang harus dipenuhi oleh pola mikro-kredit bagi pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan (Sumodiningrat, 2001), yaitu: (1) Kelompok dapat mengembalikan pinjaman yang di perolehnya dari pihak luar; (2) Kelompok dapat memperoleh modal mandiri (kelompok) setelah pinjaman dari luar tersebut dikembalikan; dan (3) Kelompok dapat melakukan akumulasi modal yang diperolehnya sehingga terjadi penambahan modal bagi kelompok dalam jangka panjang.

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Dengan terbitnya kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota lebih mempunyai ruang yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya. Seiring dengan hal ini, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan pada tingkat daerah terkecil, namun fungsi dasar pemerintah daerah tetap sebagai fasilitator, regulator, serta motivator. Artinya pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat sentral karena lebih mengerti dan memahami potensi, tantangan, kekuatan dan kelemahan daerah masing-masing. Namun pelibatan unsur-unsur lain di luar daerah juga tetap menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena apabila pemerintah daerah mengabaikan hal ini, maka kegagalan pembangunan Indonesia selama masa orde lama dan baru akan terulang kembali.

Dalam struktur kewenangan pemerintahan sekarang, ujung tombak penanggulangan kemiskinan adalah pemda. Pemerintah Pusat lebih berperan dalam proses fasilitasi dan asistensi guna mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan efektivitas pemda dalam penanggulangan kemiskinan dengan dukungan aktif para pemangku kepentingan diperlukan perbaikan sistem koordinasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan merupakan forum lintas pelaku yang diharapkan berperan mewadahi semua upaya penanggulangan kemiskinan. Tim ini berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah diatur dengan Surat Mendagri No. 412.6/2179/SJ Tahun 2006, perihal Panduan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Pemerintah Kota Pekanbaru, dibentuk melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 98 Tahun 2006 dan terdiri dari unsur pemerintah dan nonpemerintah.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) terdiri dari Walikota sebagai penanggung jawab; Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda sebagai pengarah; Wakil Walikota Sebagai Ketua dan Kepala Badan Pembangunan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) sebagai Ketua Pelaksana; dan Kabid Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), Usaha Ekonaomi Menengah (UEM) dan Pemanfaatan Sumer Daya Alam (SDA) BPMKB sebagai Sekretaris. Untuk melaksanakan program kerjanya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) membentuk empat Kelompok Kerja (pokja). Pemimpin atau anggota pokja unsur nonpemerintah terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga donor.

Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru dikelola oleh 7 (tujuh) satuan kerja seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, dan Kimpraswil (Pekerjaan Umum).

Koordinatornya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru menekankan pada tiga bina, yaitu bina manusia, bina lingkungan dan bina usahanya, pada upaya pengentasan kemiskinan ini.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat Desa/Kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan.

Dana bantuan dimaksud diberi nama Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). Pemanfaatan Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) harus memperhatikan potensi sumber daya alam desa/kelurahan serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat (BPMKB, 2006: 2). Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam merupakan salah satu Program yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sebagai pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dikemas dalam Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah program pembangunan yang sarat dengan muatan pemberdayaan masyarakat. Karena itu dalam pelaksanaan menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pelaksanaan Pemberdayaan melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ini diprioritaskan untuk pengembangan usaha kecil yang ada di desa-desa/kelurahan miskin, dan dana dikelola masyarakat melalui pemegang otoritas desa (Kepala Desa/Lurah, Ketua LKMD, dan Tokoh perempuan) dan pengelola UED-SP (Ketua, TU dan Kasir) yang difasilitasi oleh pendamping desa. Sebagai sasaran adalah Keluarga miskin yang telah memiliki usaha atau mau dan mampu berusaha serta namanya tercantum dalam register keluarga miskin di wilayahnya.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sumber dana berasal dari APBD Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru pada tahun 2006 telah mengalokasikan dana sejumlah Rp1.000.000.000,- yang dialokasikan untuk 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Muara Fajar dan Kelurahan Umban Sari di Kecamatan Rumbai. Sumber pendanaan program pemberdayaan desa berasal dari APBD kota, siklus pelaksanaan adalah 5 (lima) tahun. Sistem pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Pekanbaru.

Proses penyaluran dana usaha desa adalah sebagai berikut: Pemegang otoritas rekening desa membuka rekening untuk menerima dana dari APBD kota Pekanbaru pada bank yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Pekanbaru dengan nama Rekening Dana Usaha Ekonomi Desa (nama Desa/Kelurahan). Pengelola UED-SP juga membuka rekening untuk menampung dana yang disalurkan dari rekening dana usaha desa dan pengembalian dana pinjaman oleh pemanfaat dengan nama rekening UED-SP Desa (nama Desa/Kelurahan), dengan specimen (tanda tangan) ketua dan kasir pada bank yang sama dengan rekening dana usaha desa. Selain itu pengelola UED-SP juga membuka rekening tersendiri dengan specimen yang sama untuk menampung dan menyalurkan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam anggota UED-SP dengan nama Rekening Dana Simpan Pinjam UED-SP (nama Desa/Kelurahan). Pengelola UED-SP dibantu pendamping desa membuat surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3) dengan kepala desa/lurah dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan modal usaha.

Anggota dan kelompok pemanfaat dengan difasilitasi pendamping desa membuat

surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) yang diketahui kepala desa/lurah, dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan anggota/kelompok pemanfaat. Selanjutnya pemegang otoritas rekening dana usaha desa berdasarkan surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3) mentransfer dana dari rekening dana usaha desa ke rekening UED-SP sesuai dengan jumlah yang diajukan. Penyaluran dana usaha desa dari UED-SP ke anggota/kelompok pemanfaat dilakukan sesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha.

Pinjaman dana usaha desa oleh UED-SP ke rekening desa dikenakan jasa atau bunga pinjaman sebesar 3% per tahun, jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga dari UED-SP ke rekening dana usaha desa disepakati melalui musyawarah desa/kelurahan dan tertera pada surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3). Penetapan suku bunga pinjaman dana usaha desa/kelurahan bagi anggota/kelompok peminjam ke UED-SP, ditetapkan melalui musyawarah desa dan tertera dalam berita acara musyawarah desa/kelurahan dengan ketentuan minimal sebesar 10% per tahun. Jadwal pengembalian pokok dan bunga dari anggota/kelompok disepakati melalui musyawarah desa serta disesuaikan dengan jenis dan siklus usaha.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 04 Tahun 2006, tanggal 02 Maret 2006, tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006, maka dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan program dikota Pekanbaru, ada beberapa prinsip yang perlu menjadi panduan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: (a). Prinsip keterpaduan yang berarti bahwa kegiatan harus terkait dan terpadu dengan kegiatan lain sehingga saling mendukung dan memberikan manfaat secara optimal. Keterpaduan kegiatan ini menyangkut lokasi, dana, pengadaan sarana dan prasarana serta aparat pelaksana; (b). Prinsip kepercayaan yaitu bahwa masyarakat sebagai kelompok sasaran diberi kepercayaan memilih dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan potensi kelurahan/desa, masalah yang dihadapi, dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat itu sendiri. Tidak ada kewajiban bagi warga desa/kelurahan untuk melakukan hanya satu jenis kegiatan, tetapi yang paling penting adalah bahwa kegiatan itu harus produktif dan berkelanjutan; (c) Prinsip kebersamaan dan kegotong royongan yang berarti setiap kegiatan harus berasal dari dan untuk masyarakat secara bersama. Jenis kegiatan yang akan dibiayai adalah kegiatan yang mampu menumbuhkan kebersamaan, kegotongroyongan, kesetiakawanan dan kemitraan yang sama dalam menentukan jenis kegiatan. Prinsip kebersamaan menghendaki pula terjadinya kerjasama yang saling membantu diantara masyarakat sehingga penduduk yang sudah sejahtera membantu yang belum sejahtera; (d) Prinsip kemandirian yaitu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang dapat mendorong kelompok sasaran untuk menolong dirinya sendiri sehingga tidak ada kemungkinan menjadi miskin kembali. Kegiatan tersebut memberikan peluang bagi kelompok sasaran untuk dapat mengembangkan kegiatan sosial ekonomi anggotanya sehingga mampu menopang hidup mereka untuk seterusnya; (e). Prinsip ekonomis yaitu bahwa jenis kegiatan yang dipilih oleh kelompok sasaran harus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya sehingga taraf hidup kelompok sasaran lebih baik dari keadaan sebelumnya. Setiap kegiatan harus berdampak ekonomis yang nyata bagi anggota kelompok; dan (f). Prinsip berkelanjutan berarti kegiatan kelompok sasaran dari harus dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dipilih oleh kelompok sasaran harus dapat berkembang secara berkesinambungan sehingga tidak memerlukan bantuan lagi.

Untuk memperlancar dan mengefektifkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, penduduk miskin diharapkan membentuk kelompok sebagai wadah sasaran program, dimaksudkan agar pelayanan terhadap penduduk miskin dapat terarah,

interaksi diantara masyarakat dapat ditingkatkan dan kesetiakawanan serta kegotong royongan dapat dibangun dan dikembangkan.

Dalam pembentukan kelompok, menurut ketentuan didalam Panduan Program P2LEP (2006), ada hal-hal sebagai berikut yang dipakai sebagai prosedur pembentukan kelompok masyarakat: (1) Pembentukan kelompok didasarkan pada kebutuhan keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan anggota; (2) Harus dihindari pembentukan kelompok yang dipaksakan; (3) Dalam wadah kelompok diselenggarakan kegiatan sosial ekonomi, yaitu usaha produktif, pemupukan modal dan penghimpunan tabungan, sehingga memberikan manfaat secara ekonomis bagi semua anggota kelompok secara lestari dan berkelanjutan; dan (4) Kelompok dapat berupa kelompok yang sudah ada, atau dapat pula disiapkan, ditumbuhkan dan dibina secara khusus oleh aparat desa/kelurahan dan masyarakat setempat.

Sebagaimana diatur dalam Panduan Program, kriteria kegiatan yang sebaiknya dikembangkan adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Cepat menghasilkan, yaitu jarak waktu antara pengeluaran yang harus dilakukan dengan penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama; (b) Mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki oleh kelurahan/desa; (c) Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar sehingga memberikan nilai tambah; (d) Dapat memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya mendesak dan melibatkan sebanyak-banyaknya penduduk miskin; (e) Memberikan hasil dan dapat digulirkan pada seluruh anggota kelompok; (f) Dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dan mudah dilaksanakan; (g) Disesuaikan dengan potensi dan kondisi ekologis setempat sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan hidup; (h) Saling mendukung dan tidak bersaing dengan kegiatan lain; dan (i) Secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat.

Dana Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sebagai bentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah untuk pengembangan usaha, tidak digunakan untuk membangun prasarana fisik karena pembangunan prasarana fisik diupayakan melalui program pembangunan yang lain, baik yang khusus ditujukan untuk menunjang program ini maupun program pembangunan sektoral dan regional lainnya.

Salah satu aspek dalam program pengembangan lembaga ekonomi desa adalah pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan secara terus-menerus, kontinyu sepanjang periode program.

Pelaporan pelaksanaan program mengikuti prosedur yang ada, dilakukan dengan cepat dan tepat dan minimal harus menginformasikan tentang : persiapan pelaksanaan dan peran serta masyarakat; perkembangan penggunaan dana dari berbagai jenis kegiatan yang terinci dalam komponen dan kategori serta sumber pembiayaan program; perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan; permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Mekanisme pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dengan menganalisa laporan setiap tingkat atau jenjang.

Sehubungan dengan kegiatan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sebagai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dievaluasi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjamin agar pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat untuk menjamin tidak adanya pelanggaran baik dari aspek substantif maupun administratif, (Prasojo, 2003: 15).

Paling tidak terdapat dua sasaran evaluasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan

masyarakat ditingkat kelurahan, yaitu: Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Tingkat Pencapaian Output. Evaluasi Aspek kepatuhan meliputi konsistensi penerapan hukum dan kesesuaian dengan pedoman pelaksanaan pemberdayaan. Sedangkan evaluasi pencapaian target meliputi aspek kuantitatif, kualitatif dan daya guna program pemberdayaan masyarakat, (Prasojo, 2003: 15-16).

6. Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan pembangunan dinegara manapun pada hakikatnya hampir sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khairuddin, 1992; 28). Harapan ini sejalan dengan konsep T.H. Marshall dalam *The Right to welfare* tentang fungsi negara, dari negara *laissez-faire* menjadi negara yang aktif mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, terutama didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyatnya, terutama didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan (Ndraha, 1990; 41). Kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh harus menjadi tujuan akhir bagi setiap usaha dan setiap kebijaksanaan pemerintah (Mubyarto, 1995; 6). Kemudian ditegaskan Siagian (1998;153), bahwa pembangunan yang sifatnya komprehensif dimaksudkan bukan hanya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang sifatnya kebendaan, akan tetapi juga diarahkan kepada peningkatan mutu hidup yang antara lain tercermin dalam kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Lebih luas lagi Said (Malarangreng, 2000; 60), mengemukakan bahwa: "Cita-cita negara ditujukan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara bersama; mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi disegala bidang secara bersama; mencapai tingkat pemerataan yang adil, sekaligus mengikut sertakan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan".

Rumusan tersebut menggambarkan kesejahteraan sebagai suatu keadaan masyarakat dimana secara ideal adalah suatu tata kehidupan yang meliputi kehidupan ataupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi dalam tulisan ini kesejahteraan dimaksudkan lebih dilihat dari aspek ekonomi. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dan kenaikan pendapatan perkapita tersebut merupakan penerimaan yang dapat mendorong timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (Arsyad, 2004: 11-12). Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, Indonesia tergolong dalam kelompok negara sedang berkembang, dimana kondisi masyarakatnya menunjukkan antara lain rendahnya taraf hidup, pengembangan pengangguran dan munculnya masalah ketidakmerataan (Arsyad, 2004: 6).

Dari uraian tersebut tersebut maka upaya pemecahan masalah penanggulangan kemiskinan melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sebagai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan peluncuran program yang cukup strategis dalam mempercepat penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan keluarga.

Proses pembangunan infrastruktur dipedesaan akan dapat terwujud secara bertahap jika dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat, dimana pada akhirnya dengan dilaksanakannya kegiatan pelaksanaan pemberdayaan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, maka akan mewujudkan penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan keluarga.

Beberapa Indikator keberhasilan yang dapat dipakai, menurut Panduan Program, antara lain: (a) Berkurangnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin; (b)

Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia; (c) Meningkatnya kepedulian warga terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya; dan (d) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat.

7. Operasionalisasi Variabel

Agar tidak terdapat perbedaan persepsi dan dalam rangka melakukan pengujian, maka penulis merumuskan operasionalisasi operasional untuk variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (P2LEP), merupakan variabel independen (variabel X), dengan dimensi dan indikator-indikator sebagai berikut: Pertama, Dimensi Prinsip Pokok Pelaksanaan P2LEP, dalam penyusunan rencana P2LEP di kota Pekanbaru, ada beberapa prinsip yang perlu menjadi panduan. Adapun indikator yang digunakan adalah: (a) prinsip keterpaduan; (b) prinsip kepercayaan; (c) prinsip kebersamaan; (d) prinsip kemandirian; (e) prinsip ekonomi; dan (f) prinsip berkelanjutan. Kedua, Dimensi Kriteria Kegiatan dalam Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (P2LEP). Adapun indikator yang digunakan adalah: (a) cepat menghasilkan, yaitu jarak waktu antara pengeluaran yang harus dilakukan dengan penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama; (b) mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki oleh kelurahan/desa, (c) menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar sehingga memberikan nilai tambah; (d) dapat memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya mendesak dan melibatkan sebanyak-banyaknya penduduk miskin; (e) memberikan hasil dan dapat digulirkan pada seluruh anggota kelompok; (f) dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dan mudah dilaksanakan; (g) disesuaikan dengan potensi dan kondisi ekologis setempat sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan hidup; (h) saling mendukung dan tidak bersaing dengan kegiatan lain; dan (j) secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat. Ketiga, Dimensi Pengawasan, yaitu kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Adapun indikator yang digunakan adalah: (a) manfaat pengawasan dan (b) frekuensi pengawasan.

Adapun variabel Y dalam penelitian ini adalah Peningkatan Kesejahteraan Peserta, yaitu perubahan taraf hidup anggota kelompok masyarakat peserta menjadi lebih baik dari awalnya. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: (a) berkurangnya jumlah penduduk miskin; (b) berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang tersedia; dan (c) meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok dasar dan kebutuhan sosial lainnya.

c. Model Penelitian.

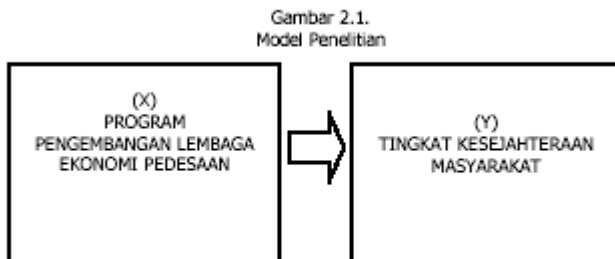
Model Penelitian adalah ringkasan kerangka berfikir yang mengandung variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melibatkan dua variabel penelitian yaitu: Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (Variabel X) dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Variabel Y). Yang hendak diketahui dari dua variabel ini adalah pengaruh

Variabel X terhadap variabel Y melalui variabel X1, X2 dan X3. Pengaruh dari masing-masing variabel akan diketahui sebelum dinyatakan pengaruh secara bersama-sama melalui uji statistik. Karena hubungan antara variabel bersifat kausal maka berdasarkan bentuk hubungan antar variabel menurut Sugiyono

47 (2006; 12), maka model penelitian dapat digambarkan pada Gambar 2.1, sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Model Penelitian



C. METODE

A. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey deskriptif. Untuk menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara cermat, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif dan hubungan-hubungan antara variabel (Sugiyono, 1994; 3).

Dimana menurut Singarimbun (Singarimbun dan Effendi, 1989: 3) yaitu: "Penelitian Survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok".

Lebih lanjut mengenai metode survey dikemukakan oleh Fowler dalam Creswell (1994; 117):

"A survey design provides a quantitative or numeric description of some faction of the population – the sample – through the data collection process of asking questions of the people. This data collection, in turn, enables a researcher to generalize the findings from a sample of responses to a population".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode survei merupakan penelitian yang mengambil data dari sebagian populasi (sampel) melalui proses pengajuan pertanyaan-pertanyaan (kuesioner), yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menggeneralisasi hasil penemuan tersebut terhadap keseluruhan populasi.

Pada penelitian jenis ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan. Sedangkan jenis hubungannya adalah hubungan kausal atau sebab akibat (Sugiyono, 2006; 11-12).

Untuk penelitian yang bersifat kausalitas, kita berupaya meneliti apa dan

seberapa jauh faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi suatu variabel. Berbeda dengan korelasi, studi kausalitas selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain studi kausalitas

49
mempertanyakan masalah sebab akibat. Model kausalitas memasukkan dan menguji variabel-variabel yang diduga mempengaruhi variabel independen. Model kausal biasanya menggunakan analisis regresi untuk menentukan mana variabel yang signifikan yang mempengaruhi variabel dependen (Kuncoro, 2004; 12-17).

Selanjutnya dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari data kualitatif yang diberi skor melalui angket yang disebarakan kepada responden.

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.

1. Populasi.

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti. Obyek penelitian dapat berupa makhluk hidup, benda-benda, sistem dan prosedur, fenomena dan lain-lain. (Kountur, 2005; 137).

Lebih lanjut menurut Sugiyono, (2006; 90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi merupakan totalitas semua anggota kumpulan lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Oleh karena itu apabila seseorang ingin meneliti semua unsur yang ada dalam satu wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, tapi jika yang hendak diteliti hanya sebagian dari populasi maka penelitiannya disebut penelitian sampel.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Karena yang hendak diketahui adalah tingkat kesejahteraan maka populasinya adalah Jumlah Kepala Keluarga (KK) menurut pentahapan keluarga sejahtera di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yaitu sebesar 2.651 KK.

50

2. Sampel.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Arikunto, 2002; 109).

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan daerah penelitian (Suratno dan Arsyad, 2003:119). Di mana lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru, secara sengaja (purposive) peneliti memilih Kecamatan Rumbai sebagai daerah penelitian. Karena program Pengembangan Lembaga Perekonomian Pedesaan tahun 2006 baru ada di kecamatan Rumbai. Secara lengkapnya dapat diperoleh data sebagai berikut:

Kelurahan yang dipilih dari Kecamatan Rumbai:

- Kelurahan Muara Fajar, jumlah anggota kelompok 45 orang.
- Kelurahan Umban sari, jumlah anggota kelompok 45 orang.

Sehingga besarnya jumlah responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok masyarakat yang ada di 2 Kelurahan terpilih yaitu 90 orang anggota kelompok masyarakat.

3. Penentuan Informan.

Untuk menentukan informan/ focus group, dilakukan teknik penarikan sampel secara sengaja (purposive sampling), sebanyak 4 orang yang dipilih dari semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan terpadu Kota Pekanbaru pada Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan (P2LEP), yaitu terdiri dari: Camat yang dipilih sebagai sampel: 1 orang, Kepala Kelurahan: 2 orang, Pemimpin Kegiatan: 1 orang.

4. Penentuan Kelembagaan/ Instansi.

Kelembagaan /Instansi yang dijadikan sumber data yaitu terdiri dari: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB), Kantor 51

Camat Rumbai serta kantor-kantor tempat penyimpanan data sekunder untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah merupakan sebuah tahapan yang sangat penting yang harus dilakukan secara benar, akurat dan objektif. Sebagaimana menurut pendapat Nazir, (1995; 211), bahwa: Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Dari sampel yang ada maka dalam penelitian ini diperlukan data yang valid, reliabel dan objektif. Oleh karenanya peranan perangkat instrumen penelitian sangat menentukan dalam pengumpulan data. Seperti pendapat Arikunto (2002; 177), bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul.

Atas dasar pernyataan tersebut, penulis menggunakan model pengumpulan data primer dan data skunder sebagai berikut:

1. Dokumentasi.

Dokumen-dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian. Surakhmad (1990; 126), memberikan batasan yaitu:

“Kita dapat merumuskan pengertian dokumentasi sebagai laporan tertulis dari peristiwa yang isinya terdiri dari kejelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan peristiwa tersebut”.

Melalui teknik dokumentasi ini diharapkan akan diperoleh data yang akurat dengan langkah-langkah mempelajari arsip, catatan, laporan-laporan maupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Angket atau Kuesioner.

Sebagaimana penelitian survei pada umumnya, dalam penelitian ini yang menjadi instrumen pokok dalam mendapatkan data penelitian adalah 52

berupa angket atau kuesioner yang diberikan kepada responden untuk diisi, selanjutnya hasil dari angket tersebut akan diolah untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari responden, berupa pertanyaan yang disusun secara sistematis dan diisi oleh responden berdasarkan pilihan alternatif jawaban yang ada.

Untuk mendapatkan data dalam bentuk angka penulis menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial yang diteliti. Fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata sebagai berikut :

- a. Sangat Positif, diberi nilai 5
- b. Positif, diberi nilai 4
- c. Netral, diberi nilai 3
- d. Negatif, diberi nilai 2
- e. Sangat negatif, diberi nilai 1

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen, sebelum kuesioner disebarikan kepada responden maka harus diuji validitas dan uji reliabilitas yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tehnik pengolahan data.

3. Wawancara.

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang disiapkan langsung oleh penulis.

4. Observasi.

Observasi, merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Hasil obesrvasi merupakan data pendukung untuk lebih memperjelas deskripsi permasalahan yang ada.

53

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

1. Teknik Pengolahan Data.

Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel (populasi). Semua data yang merupakan variabel yang kita ukur dapat diklasifikasikan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut.

Sejalan dengan uraian pada instrumen penelitian, penulis dalam penelitian ini menggunakan kategori dengan skala likert. Sebelum melakukan perhitungan dengan Statistik Korelasi Pearson Product Moment dan Regresi Linear Berganda pada analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tranformasi Data

Agar dapat dianalisis maka data harus diolah dengan cara transformasi data ordinal ke interval. Hal ini karena data yang didapat dari penyebaran kuesioner adalah data ordinal, sedangkan dalam perhitungan korelasi Pearson Product Moment diperlukan data interval (Al Rasyid, 1994; 131-134). Regresi Linier Berganda juga mensyaratkan menggunakan minimal

data interval (metrik), sebagaimana dijelaskan oleh Supranto (2004; 18) bahwa regresi linier berganda adalah metode analisis yang tepat dipergunakan kalau penelitian (research problem) melibatkan satu variabel tidak bebas Y yang metrik yang dipengaruhi atau terkait dengan lebih dari satu variabel X yang metrik atau non metrik.

Untuk tranformasi data ordinal menjadi data interval, dalam penelitian ini digunakan Metode Interval Berurutan (Method Of Succssive Interval), adapun langkah-langkahnya secara garis besar dijelaskan Al Rasyid (1994; 23), sebagai berikut:

1. Menentukan frekuensi setiap responden, yaitu banyaknya responden yang memberikan respon yang ada.

54

2. Menentukan proporsi setiap respon dengan membagi setiap bilangan pada frekuensi dengan jumlah sampel.

3. Menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respon sehingga diperoleh proporsi kumulatif.

4. Menentukan nilai Z untuk masing-masing proporsi kumulatif yang dianggap menyebar mengikuti sebaran normal baku.

5. Menghitung Scale Value (SV) untuk masing-masing respon dengan menggunakan rumus:

$$SV_i = \frac{\text{Density at lower limit} - \text{Density at upper limit}}{\text{Area under upper limit} - \text{Area under lower limit}}$$

6. Menentukan nilai skala intervalnya (K).

$K = 1 + |SV \text{ min} |$

7. Gantilah setiap skor dengan nilai K yang sesuai untuk masing-masing skor dalam satu item.

b. Uji Validitas

Sebelum dilakukan penelitian. Hal pertama dilakukan yaitu menguji kevalidan angket yang digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, kemudian dilakukan pengujian terhadap kuesioner untuk mengukur tingkat kebaikan kuesioner, maka kita dapat melakukan analisis validitas dan reliabilitas kuesioner.

Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Tingkat validitas kuesioner diukur berdasarkan koefisien validitas yang dalam hal ini menggunakan koefisien korelasi item-total yang terkoreksi. Menurut Kaplan suatu pertanyaan dikatakan valid dan dapat mengukur variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien validitasnya antara 0,3 sampai dengan 0,4.

“ Not all validity coefficient are the same value, and there are no hard fast rule about how large the coefficient must be in order to be meaningful. In practice, it is rare to see a validity coefficient larger than 0.6, and validity coefficient in the range of 0.3 to 0.4 are commonly considered high.”

(Robert M. Kaplan & Dennis P. Saccuzzo, ,1993 p: 141).

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata

55

lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan

beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut.

Lebih lanjut Kaplan (1993; 126) menyatakan:

“ It has been suggested that reliability estimates in the range of 0.7 to 0.8 are good enough for most purposes in basic research.”

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

Keputusan validitas dan reliabilitas item menggunakan kriteria

Kaplan sebagai berikut:

1. Item dinyatakan valid jika koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0.3.
2. Kelompok item dalam suatu dimensi dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitasnya tidak lebih rendah dari 0.7

Pengujian ini dilakukan sebelum penelitian pada sampel yang sebenarnya. Yaitu pada 15 (lima belas sampel) orang warga Kecamatan Rumbai.

Rumus yang digunakan:

Validitas: Koefisien Korelasi Pearson (Product Moment)

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

dimana :

r = Koefisien validitas item/ butir pertanyaan.

X = Skor tiap item / butir pertanyaan.

Y = Skor total item / butir pertanyaan.

n = Jumlah sampel uji coba.

c. Uji Reliabilitas

Perhitungan Koefisien Reliabilitas menggunakan rumus Split Half (teknik belah dua).

Langkah perhitungan:

Bagilah data setiap variabel menjadi dua belahan. Untuk variabel X, belahan pertama (pertanyaan nomor ganjil dan belahan kedua Y (pertanyaan nomor

56 genap). Jumlahkan masing-masing data tiap belahan untuk tiap responden, kemudian carilah korelasinya dengan rumus korelasi Product Moment berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

X = jumlah skor belahan 1

Y = jumlah skor belahan 2

Koefisien validitasnya adalah

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Hitung nilai r tot dengan rumus:

$$r_{\text{tot}} = \frac{2 \times r_{tt}}{1 + r_{tt}}$$

Bila koefisien reliabilitas telah dihitung, maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan **kriteria Guilford (1956)**, yaitu:

1. $< 0,20$: Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan
2. $0,20 - < 0,40$: Hubungan yang kecil (tidak erat)
3. $0,40 - < 0,70$: Hubungan yang cukup erat
4. $0,70 - < 0,90$: Hubungan yang erat (reliabel)
5. $0,90 - < 1,00$: Hubungan yang sangat erat (sangat reliabel)
6. $1,00$: Hubungan yang sempurna

2. Teknik Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengungkapkan gambaran mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di kecamatan Rumbai, seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2006; 169), yaitu:

57

“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”.

Kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan pengaruhnya kepada tingkat kesejahteraan masyarakat Peserta dideskripsikan melalui teknik kategorisasi berdasar skor total responden, skor total item, maupun skor total keseluruhan. Kategorisasi dilakukan dengan membagi rentang atau wilayah skor menjadi 4 kuartil sebagaimana merujuk kepada Al Rasyid (1994; 128). Kategorisasi menghasilkan kategori kualitas sebagai berikut:

- Rendah : minimal ; skor total $<$ kuartil I.
- Kurang : kuartil I ; skor total $<$ median.
- Cukup : median ; skor total $<$ kuartil III.
- Tinggi : kuartil III ; skor total $<$ maksimal.

Dimana:

Minimal = skor total minimal yang dapat dicapai.

Maksimal = skor total maksimal yang dapat dicapai.

Median = (minimal + maksimal) / 2.

Kuartil I = skor (minimal + median) / 2

Kuartil III = (median + maksimal) / 2

Setelah dilakukan penilaian berdasarkan kriteria tersebut kemudian diinterpretasikan kedalam bentuk deskriptif analisis terhadap tanggapan responden yang berkaitan dengan item pertanyaan dan informasi yang diperoleh dari pengamatan, wawancara serta studi dokumentasi/kepustakaan.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda

(Multiple Linier Regression), sejalan dengan yang dikemukakan oleh Supranto (2004; 18), bahwa:

“Regresi linear berganda adalah metode analisis yang tepat dipergunakan kalau penelitian melibatkan satu variabel tidak bebas Y yang metrik dipengaruhi atau terkait dengan lebih dari satu variabel X yang metrik atau non-metrik”.

58

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) yang ditunjukkan oleh Prinsip Pokok, Prosedur dan jenis Usaha serta pengawasan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap variabel terikat (Y) yang ditunjukkan oleh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Dimana menurut Sugiyono (2006; 243) untuk menganalisis data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian dapat digunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = Nilai variabel terikat yang diprediksikan.

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = angka atau arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel terikat yang didasarkan pada variabel bebas.

X1 = Nilai variabel bebas Prinsip Pokok.

X2 = Nilai variabel bebas Kriteria Kegiatan.

X3 = Nilai variabel bebas Pengawasan.

Untuk mengetahui nilai a, b1, b2 dan b3 menurut Sugiyono (2006; 246), adalah dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Sigma Y &= an + b_1\Sigma X_1 + b_2\Sigma X_2 \\ \Sigma X_1 Y &= a \Sigma X_1 + b_1\Sigma X_1^2 + b_2\Sigma X_1 X_2 \\ \Sigma X_2 Y &= a \Sigma X_2 + b_1\Sigma X_1 X_2 + b_2\Sigma X_2^2 \end{aligned}$$

Untuk membantu perhitungan data didalam penelitian ini, penulis menggunakan perangkat lunak (software) SPSS ver.13 yang menyediakan berbagai fasilitas pengolahan data statistik.

c. Uji Statistik.

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).

Sebagaimana yang dikemukakan Kuncoro, (2004: 8-12), bahwa Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesisnya dapat diterangkan sebagai berikut:

$$H_0 : b_1 = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

$$H_a : b_1 \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis tersebut dengan uji statistik t, harus ditentukan lebih dulu nilai kritis, yang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$t = (b_i - 0) / S = b_i / S$$

Dimana:

S = deviasi standar.

b_i = koefisien variabel ke i

Nilai S dihitung dari akar varians atau S^2 , yang diperoleh dari SSE dibagi dengan jumlah derajat kebebasan (degree of freedom), dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$S^2 = \frac{SSE}{n - k}$$

dimana:

n = ukuran sampel.

k = jumlah variabel bebas.

Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel: apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibanding nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif (H_a), yang menyatakan bahwa satu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Kuncoro, 2004; 82).

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2004; 82). Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen, atau:

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji kedua hipotesis tersebut digunakan Statistik F (Kuncoro, 2004; 82), dengan persamaan sebagai berikut:

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR/k}{SSE/(n-k)}$$

dimana:

SSR = sum of square due to regression = $\sum (Y_i - \hat{y})^2$

SSE = sum of square error = $\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$

n = jumlah sampel

MSR = mean squares due to regression

MSE = mean of square due to error

Pada dasarnya nilai F diturunkan dari tabel ANOVA (analysis of variance), bahwa $TSS = SSR + SSE$, artinya, total of sum squares (TSS) bersumber dari variasi regresi (SSR) dan variasi kesalahan (SSE), yang dibagi dengan derajat bebasnya masing-masing. Tabel anova disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1

Tabel ANOVA

Tabel.3.1
Tabel ANOVA

Sumber (Source)	SS (Sum of Squares)	df (degree of freedom)	MS (Means of Squares)
Regresi (Regression)	SSR	k	MSR = SSR/k
Residual (error)	SSE	n - k	MSE = SSE/(n - k)
Total	TSS	n - 1	

Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel: bila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari pada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif (H_a), yang menyatakan semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Kuncoro, 2004; 83).

61

3. Koefisien Determinasi.

Sebagaimana dikemukakan Kuncoro (2004; 84), bahwa persamaan tersebut menunjukkan proporsi total jumlah kuadrat (TSS) yang diterangkan oleh variabel independen dalam model. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, formulasi model yang keliru dan kesalahan eksperimental.

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro, 2004; 84).

62

Kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan pengaruhnya kepada tingkat kesejahteraan masyarakat Peserta dideskripsikan melalui teknik kategorisasi berdasar skor total responden, skor total item, maupun skor total keseluruhan. Kategorisasi dilakukan dengan membagi rentang atau wilayah skor menjadi 4 kuartil sebagaimana merujuk kepada Al Rasyid (1994: 128). Kategorisasi menghasilkan kategori kualitas sebagai berikut:

Kategorisasi menghasilkan kategori kualitas sebagai berikut:

Rendah : minimal \leq skor total $<$ kuartil I.
Kurang : kuartil I \leq skor total $<$ median.
Cukup : median \leq skor total $<$ kuartil III.
Tinggi : kuartil III \leq skor total $<$ maksimal.
Dimana:
Rendah : (90 \leq skor total $<$ 180).
Kurang : (180 \leq skor total $<$ 270).
Cukup : (270 \leq skor total $<$ 360).
Tinggi : (360 \leq skor total $<$ 450).

Analisis deskriptif terhadap variabel dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan jawaban atau penilaian responden pada setiap variabel dan sub variabel, baik dalam variabel variabel bebas maupun variabel terikat. Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung skor total setiap sub variabel, kemudian melihat posisi antar skor minimal sampai dengan skor maksimal.

Jika posisi skor total sudah diketahui, maka ditentukan kriteria berdasarkan berdasarkan posisi tersebut. Seperti telah dikemukakan pada Bab III tersebut, bahwa skor tertinggi jawaban responden untuk setiap item pertanyaan adalah $5 \times 90 = 450$, dan skor terendah $1 \times 90 = 90$. Besar Median untuk masing-masing item pertanyaan sebesar 270, dengan kuartil I sebesar 180 dan kuartil III sebesar 360.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Analisis data dilakukan dengan menghitung, mempersepsikan, dan menafsirkan data hasil penelitian yang telah diolah. Analisis dilakukan dengan menampilkan hasil pengolahan data variabel X kemudian diteruskan dengan analisis data variabel Y yang kemudian diakhiri dengan menghitung besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (P2LEP).

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru akan dilihat dari 3 dimensi yaitu Prinsip Pokok, Kriteria Kegiatan, dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Program.

Dimensi Prinsip Pokok

Dimensi prinsip pokok merupakan dimensi yang dijadikan ukuran bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilaksanakan. Dimensi ini terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut: (a) prinsip keterpaduan; (b) prinsip kepercayaan; (c) prinsip kebersamaan dan kegotong royongan; (d) prinsip kemandirian; (e) prinsip ekonomis; dan (f) prinsip berkelanjutan. Hasil pendistribusian kuesioner mengenai Dimensi Prinsip Pokok dapat dilihat pada **tabel**

Tabel ...
Dimensi Prinsip Pokok

No.	Item Pernyataan	Skor Hasil Penelitian						Skor Maks.	% Thd Skor Maks	Kategori
		SS	S	TB	TS	STS	Jml			
1.	Keterpaduan	35	112	60	70	0	277	450	61,56	Cukup
2.	Kepercayaan	0	144	111	34	0	289	450	64,22	Cukup
3.	Kebersamaan dan kegotongroyongan	30	248	66	0	0	344	450	76,44	Cukup
4.	Kemandirian	0	84	129	52	0	265	450	58,89	Kurang
5.	Ekonomis	40	188	78	18	0	324	450	72,00	Cukup
6.	Berkelanjutan	0	0	84	92	16	192	450	42,67	Kurang
	Jumlah	105	776	528	266	16	1.691	2.700	62,63	Cukup

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari data pada tabel ... terlihat bahwa secara keseluruhan 'Dimensi Prinsip Pokok' berada dalam kategori cukup. Hal tersebut disebabkan oleh persepsi responden yang menyatakan tidak ada satupun dari enam indikator yang diukur termasuk kategori tinggi. Dari enam indikator tersebut, empat indikator berada pada kategori cukup, sedang dua indikator lain berada pada kategori kurang yaitu 'kemandirian' dan 'berkelanjutan'.

Dalam panduan program dijelaskan bahwa 'kemandirian' dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan peluang bagi kelompok masyarakat peserta mengembangkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat peserta sehingga mampu menopang hidupnya untuk seterusnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Payne (Rukminto Adi, 2002: 162-163), bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah: "Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka". Dengan demikian, dari hasil penelitian, nampaknya kemandirian masyarakat belum sepenuhnya seperti yang diharapkan.

Yang dimaksud dengan 'berkelanjutan' adalah bahwa kegiatan kelompok sasaran dari harus dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dipilih oleh kelompok sasaran harus dapat berkembang secara berkesinambungan sehingga tidak memerlukan bantuan lagi. Masyarakat peserta sebagai kelompok sasaran pelaksanaan pemberdayaan, dengan mengacu kepada pendapat Sumodiningrat (2001), yaitu ciri yang harus dipenuhi oleh pola mikro-kredit dalam pemberdayaan masyarakat, adalah: (1) kelompok dapat mengembalikan pinjaman yang di perolehnya dari pihak luar; (2) kelompok dapat memperoleh modal mandiri (kelompok) setelah pinjaman dari luar tersebut dikembalikan; dan (3) kelompok dapat melakukan akumulasi modal yang diperolehnya sehingga terjadi penambahan modal bagi kelompok dalam jangka panjang. Dengan demikian, nampaknya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan belum dirasakan berkelanjutan dalam arti hanya bersifat temporer.

Dimensi Kriteria Kegiatan

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 04 Tahun 2006, tanggal 02 Maret 2006, tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006, ada beberapa Kriteria kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kriteria kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan, dilihat dari 13 indikator yang tertuang

dalam 14 item pernyataan. Data hasil distribusi kuesioner dapat dilihat pada tabel ...

Tabel ...
Dimensi Kriteria Kegiatan

No.	Item Pernyataan	Skor Hasil Penelitian						Skor Maks.	% Thd Skor Maks	Kategori
		SS	S	TB	TS	STS	Jml			
1.	Pembentukan kelompok berdasar kebutuhan	95	256	6	10	0	367	450	81,56	Tinggi
2.	Dihindari pembentukan kelompok yang dipaksakan	65	292	3	6	0	366	450	81,33	Tinggi
3.	Diselenggarakan kegiatan sosial ekonomi	315	100	6	0	0	421	450	93,56	Tinggi
4.	Melibatkan seluruh masyarakat	165	224	3	0	0	392	450	87,11	Tinggi
5.	Ada pembinaan secara khusus	140	40	153	2	0	335	450	74,44	Cukup
6.	Cepat menghasilkan	0	24	54	122	5	205	450	45,56	Kurang
7.	Mendayagunakan potensi yang ada	0	28	39	122	9	198	450	44,00	Kurang
8.	Hasil produk dapat dipasarkan	45	208	87	0	0	340	450	75,56	Cukup
9.	Dapat memenuhi kebutuhan dasar	50	224	0	48	0	322	450	71,56	Cukup
10.	Hasil dapat digulirkan	0	96	102	64	0	262	450	58,22	Kurang
11.	Cara-cara sudah dikenal oleh masyarakat	20	248	72	0	0	340	450	75,56	Cukup
12.	Disesuaikan dengan potensi dan kondisi	20	308	27	0	0	355	450	78,89	Cukup
13.	Saling mendukung	55	316	0	0	0	371	450	82,44	Tinggi
14.	Dapat diterima masyarakat	70	304	0	0	0	374	450	83,11	Tinggi
	Jumlah	1.040	2.668	552	374	14	4.648	6.300	73,78	Cukup

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari data pada tabel ... terlihat bahwa secara keseluruhan 'Dimensi Kriteria Kegiatan' berada dalam kategori cukup. Sekalipun terdapat lima indikator yang dipersepsi tinggi oleh responden, namun masih ada indikator yang dipersepsi cukup sebanyak 5 indikator dan kurang sebanyak 3 indikator. Tiga indikator lain berada pada kategori kurang yaitu 'cepat menghasilkan', 'mendayagunakan potensi yang ada', dan 'hasil dapat digulirkan'.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sebenarnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tergolong cepat menghasilkan, karena usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yaitu berdagang (buah-buahan, warung, sayuran dan lain-lain). Namun karena tidak menentunya kenaikan harga barang-barang, menyebabkan banyak diantara mereka yang bangkrut. Hal ini lah yang pada akhirnya membuat reponden mempersepsikan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka cenderung kurang cepat menghasilkan.

Dalam kaitannya dengan pendayagunaan potensi yang ada, berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sebenarnya hanya sebagian potensi yang ada digunakan oleh kelompok masyarakat peserta karena sebagian lagi didatangkan dari luar wilayah bahkan dari luar daerah, baik berupa sayur-sayuran maupun buah-buahan yang dijual oleh para anggota kelompok.

Kemudian, berkaitan dengan pengguliran modal, hasil wawancara sejalan dengan hasil penyebaran kuesioner, dimana masyarakat yang diwawancarai memberikan informasi bahwa tidak semua kelompok masyarakat dapat menggulirkan modalnya. Hal tersebut terjadi karena kegiatan usaha yang mereka lakukan belum memberikan keuntungan yang diharapkan.

Dimensi Pengawasan

Pengawasan sebagaimana diatur dalam panduan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Data hasil distribusi kuesioner dapat dilihat pada **tabel ...**

Tabel ...
Dimensi Pengawasan dalam Pelaksanaan Program

No.	Item Pernyataan	Skor Hasil Penelitian						Skor Maks.	% Thd Skor Maks	Kategori
		SS	S	TB	TS	STS	Jml			
1.	Kesesuaian kegiatan dengan prinsip pokok	65	308	0	0	0	373	450	82,89	Tinggi
2.	Pelaksanaan pengawasan oleh dinas terkait	0	28	9	160	0	197	450	43,78	Kurang
3.	Pengawasan berkesinambungan	0	0	39	154	0	193	450	42,89	Kurang
	Jumlah	65	336	48	314	0	763	1.350	56,52	Kurang

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari data pada **tabel ...** terlihat bahwa secara keseluruhan 'Dimensi Pengawasan dalam Pelaksanaan Program' berada dalam kategori kurang. Sekalipun terdapat satu indikator yang dipersepsi tinggi oleh responden, namun dua indikator lain dipersepsi kurang. Adapun indikator yang berada pada kategori kurang yaitu 'pelaksanaan pengawasan oleh dinas terkait' dan 'pengawasan berkesinambungan'.

Jika merujuk pada Panduan Pelaksanaan Program, 'pengawasan' adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus, kontinyu sepanjang periode program.

Namun, jika mencermati data yang ada pada **tabel ...** terlihat bahwa nampaknya dinas/instansi terkait kurang melakukan pengawasan yang seharusnya menjadi fungsinya. Kurangnya pengawasan tentu berdampak pada pelaksanaan program yang sangat mungkin melenceng dari arah yang seharusnya.

Selain kurangnya pengawasan, nampaknya pengawasan pun tidak dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada. Dengan kata lain, jika pun dilakukan pengawasan, maka hal tersebut hanya dilakukan secara temporer, tidak berkelanjutan.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah perubahan taraf hidup anggota kelompok masyarakat peserta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Data hasil distribusi kuesioner dapat dilihat pada **tabel ...**

Tabel ...
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

No.	Item Pernyataan	Skor Hasil Penelitian						Skor Maks.	% Thd Skor Maks	Kategori
		SS	S	TB	TS	STS	Jml			
1.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	60	232	42	12	0	346	450	76,89	Cukup

2.	Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan	0	240	42	24	4	310	450	68,89	Cukup
3.	Meningkatnya kepedulian masyarakat	30	0	84	102	5	221	450	49,11	Kurang
4.	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat	50	196	78	10	0	334	450	74,22	Cukup
	Jumlah	140	668	246	148	9	1.211	1.800	67,28	Cukup

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari data pada tabel ... terlihat bahwa secara keseluruhan 'Variabel Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat' berada dalam kategori cukup. Dari tabel tersebut terlihat tidak ada satupun indikator yang dipersepsi tinggi. Dari tiga indikator, yang diukur melalui empat item pernyataan, ketiga indikator anya dipersepsi cukup. Bahkan satu item yang digunakan untuk mengukur indikator terakhir dipersepsi kurang oleh responden.

Dari data pada tabel ... nampaknya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan belum dapat menyebabkan meningkatnya kepedulian warga masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di lingkungannya.

3. Pengujian Hipotesis Penelitian

Sebelum melakukan pengujian hipotesis melalui perhitungan statistik analisis regresi terhadap tanggapan angket 90 orang responden, maka terlebih dahulu dilakukan tranformasi data, dari data ordinal ke data interval. Dari hasil transformasi data tersebut, kemudian dapat digunakan untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan instrumen pengumpul data jenis angket. Terdapat dua variabel dalam angket yang digunakan, yaitu variabel Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan, terdiri dari: dimensi prinsip pokok (X1), dimensi kriteria kegiatan (X2) dan dimensi pengawasan (X3) serta variabel Tingkat Kesejahteraan masyarakat (Y). Dari ketiga variabel independen dan satu variabel dependen yang telah ditetapkan, hipotesis penelitian sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab II terdahulu. Sedangkan untuk melakukan pengujian hipotesis tersebut digunakan alat analisis yaitu analisis regresi linier berganda. Pengolahan data yang digunakan adalah Aplikasi SPSS ver. 13.

Analisis Regresi.

Bentuk persamaan regresi untuk melihat pengaruh prinsip pokok, kriteria kegiatan serta pengawasan dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta dalam penelitian ini dihitung menggunakan analisis regresi linier multiple sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Perhitungan koefisien regresi dilakukan dengan komputer dengan menggunakan SPSS 13 dan setelah perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.36.
Koefisien Regresi Prinsip Pokok, Kriteria Kegiatan dan Pengawasan Terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.906	1.930		4.090	.000
	X1	.220	.074	.316	3.981	.000
	X2	.019	.049	.041	2.392	.000
	X3	.014	.137	.011	2.101	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: hasil pengolahan SPSS Ver.13.

Hasil pengolahan data yang diperoleh dalam tabel 4.35. tersebut dapat ditulis dengan bentuk suatu persamaan regresi dengan model taksiran sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 7,906 + 0,220X_1 + 0,019X_2 + 0,014X_3$$

Agar dapat mendukung kebenaran dari persamaan regresi linier berganda tersebut maka terlebih dahulu akan dilakukan uji statistik yang meliputi uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), uji signifikansi secara bersama-sama/simultan (uji statistik F) dan uji koefisien determinasi (R²).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

1). Pengaruh Prinsip Pokok Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ada pengaruh prinsip pokok pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya kualitas prinsip pokok dilaksanakan secara parsial merupakan faktor penentu tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan anggota kelompok masyarakat penerima Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Berpengaruh positif artinya memiliki arah positif, yaitu semakin tinggi kualitas prinsip pokok dilaksanakan, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan anggota masyarakat penerima program. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kualitas prinsip pokok dilaksanakan semakin rendah pula tingkat kesejahteraan anggota kelompok masyarakat.

Dengan menguji dua arah dalam tingkat signifikansi dan derajat kebebasan (degree of freedom) atau $df = (\hat{\alpha}/2, n-k-1)$ dimana $\hat{\alpha}$ menunjukkan tingkat signifikansi analisis, n menunjukkan jumlah observasi dan k menunjukkan jumlah variabel independen, hasil pengujian akan menghasilkan dua kesimpulan menurut hipotesis tersebut tadi yaitu:

1. Bila $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak, berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan nilai t tabel dengan tingkat signifikansi $(\hat{\alpha}/2) = 0,025$, dan $df = 86$, diperoleh nilai t tabel sebesar 1,99. Dari tabel 4.34. di atas dapat dilihat bahwa t hitung () $> t \text{ tabel} = (3,981 > 1,99)$, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen **1 X**.

Sehingga dapat dikatakan dimensi prinsip pokok pada variabel Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan berhubungan secara positif dan signifikan dengan variabel tingkat kesejahteraan

masyarakat, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh prinsip pokok terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diterima.

2). Pengaruh Kriteria Kegiatan dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada pengaruh kriteria kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya kualitas kriteria kegiatan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan secara parsial merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kesejahteraan anggota kelompok masyarakat

penerima Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Berpengaruh positif artinya memiliki arah positif, yaitu semakin tinggi kualitas kriteria kegiatan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan anggota masyarakat penerima program. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kualitas kriteria kegiatan dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan semakin rendah pula tingkat kesejahteraan anggota kelompok masyarakat.

Dengan menguji dua arah dalam tingkat signifikansi dan derajat kebebasan (degree of freedom) atau $df = (\alpha/2, n-k-1)$ dimana α menunjukkan tingkat signifikansi analisis, n menunjukkan jumlah observasi dan k menunjukkan jumlah variabel independen, hasil pengujian akan menghasilkan dua kesimpulan menurut hipotesis tersebut tadi yaitu:

1. Bila $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan nilai $t \text{ tabel}$ dengan tingkat signifikansi $(\alpha/2) = 0,025$, dan $df = 86$, diperoleh nilai $t \text{ tabel}$ sebesar 1,99. Dari tabel 4.34. di atas dapat dilihat bahwa $t \text{ hitung} () > t \text{ tabel} = (2,392 > 1,99)$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen **2 X**.

Sehingga dapat dikatakan dimensi kriteria kegiatan pada variabel Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan berhubungan secara positif dan signifikan dengan variabel tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh kriteria kegiatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diterima.

3). Pengaruh Pengawasan dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Hipotesis ketiga menyatakan ada pengaruh pengawasan dalam pelaksanaan program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat. Perubahan yang diharapkan sebagai akibat dari pengawasan yang dilaksanakan akan mengarah kepada harapan masyarakat untuk peningkatan taraf hidup mereka. Oleh karena itu diasumsikan apabila pengawasan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilaksanakan akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk membuktikan apakah hipotesis ini memiliki kebernaan secara ilmiah, maka dilakukan pengujian secara statistik sebagai berikut. Seperti terlihat pada tabel 4.34. tersebut, dengan nilai $t \text{ tabel}$ dengan tingkat signifikansi $(\alpha/2) = 0,025$, dan $df = 86$, diperoleh nilai $t \text{ tabel}$ sebesar 1,99 dapat dilihat bahwa $t \text{ hitung} (3 X) > t \text{ tabel} = (2,101 > 1,99)$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Sehingga dapat dikatakan dimensi pengawasan pada variabel Pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan berhubungan secara positif dan signifikan dengan variabel tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh pengawasan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diterima.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh prinsip-prinsip pokok, kriteria kegiatan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan secara bersama-sama terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Atau dengan kata lain $H_0: b_1 = b_2 = b_3$, Artinya, semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen, dan $H_a : b_1 \neq 0, b_2 \neq 0, b_3 \neq 0$ Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji persamaan regresi linear dapat digunakan tabel analisis varians (ANOVA). Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, dimana $1 \text{ } \bar{d} = k$ dan $2 \text{ } \bar{d} = n-k-1$ dan derajat kekeliruan 5% (0,05), maka H_0 ditolak, artinya ada nilai $\hat{\beta}$ yang tidak sama dengan nol atau model berarti. Dengan menggunakan software SPSS 13 diperoleh ANOVA sebagai berikut:

Tabel 4.37.
Uji F
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	62.044 ^a	3	20.681	3.491	.000 ^b
Residual	509.467	87	5.924		
Total	571.509	90			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: hasil pengolahan SPSS Ver.13

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai F hitung yang didapat sebesar 3,491, untuk F tabel dengan $\alpha = 0,05$, dan masing-masing nilai $1 \text{ } \bar{d} = 3, 2 \text{ } \bar{d} = 87$, diperoleh dari nilai F tabel sebesar 2,71, karena $F_{hitung} = 3,491 > F_{tabel} = 2,71$ maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip pokok, kriteria kegiatan serta pengawasan terhadap peningkatan kesejahteraan peserta. Dengan kata lain persamaan regresi yang terbentuk dari dimensi prinsip pokok, kriteria kegiatan dan pengawasan dari variabel pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dapat dipergunakan untuk meramalkan tingkat kesejahteraan masyarakat peserta di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Uji Koefisien Determinasi

Untuk melihat kekuatan hubungan secara bersama sama variabel independen dengan variabel dependen digunakan koefisien korelasi multiple (R^2) dan pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh koefisien determinasi multiple (KD) . Dengan menggunakan software SPSS 13, hasil perhitungan besar hubungan secara bersama sama serta pengaruhnya dapat dilihat pada tabel 4.38. berikut:

Tabel. 4.38.
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 ^a	.683	.673	2.32347

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: data pengolahan SPSS Ver.13

Berdasarkan tabel 4.38. tersebut diketahui bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah sebesar 0,826 yang bila dikonsultasikan kepada kategori korelasi menurut kriteria Guilford (1956), termasuk **korelasi yang erat (reliabel)**.

Sementara jika dilihat dari nilai koefisien determinasi pasangan ketiga variabel adalah 0,683. namun untuk jumlah variabel bebas lebih dari dua, lebih baik digunakan Adjusted R square, sebesar 0,673 (67,3%). Jadi dapat dikatakan bahwa kontribusi dari dimensi prinsip-prinsip pokok, kriteria kegiatan serta pengawasan dari variabel pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap variabel peningkatan kesejahteraan peserta adalah 67,3%. Sedangkan sisanya sebesar 32,7% perubahan yang terjadi pada peningkatan kesejahteraan peserta disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dan tidak dibahas dalam penelitian ini.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Prinsip Pokok Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Berdasarkan hasil jawaban responden dan pengamatan terhadap dimensi prinsip pokok diperoleh gambaran sebagai berikut. Prinsip-prinsip tersebut adalah: (a). Prinsip keterpaduan; (b). Prinsip kepercayaan; (c) Prinsip kebersamaan dan kegotong royongan; (d) Prinsip kemandirian; (e). Prinsip ekonomis; dan (f). Prinsip berkelanjutan.

Untuk Prinsip-prinsip: keterpaduan, kepercayaan, kebersamaan dan prinsip ekonomi termasuk dalam kategori cukup. Sedangkan Prinsip-prinsip kemandirian dan prinsip berkelanjutan termasuk dalam kategori kurang.

Sedangkan dari hasil regresi dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip pokok memiliki hubungan positif yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai koefisien regresi dimensi prinsip pokok terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,220 maka dapat dikatakan arah kecenderungan adalah: pada setiap terjadi penambahan/peningkatan pada dimensi prinsip pokok juga akan memberikan pengaruh peningkatan sebesar 0,220 kali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Kriteria Kegiatan dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Berdasarkan hasil jawaban responden dan pengamatan terhadap dimensi kriteria kegiatan diperoleh gambaran sebagai berikut. Dari 13 indikator dan 14 item pertanyaan pada dimensi kriteria kegiatan ini 6 indikator termasuk kategori tinggi yaitu Pembentukan kelompok berdasar kebutuhan, Harus dihindari pembentukan kelompok yang dipaksakan, Diselenggarakan kegiatan sosial ekonomi, kegiatan saling mendukung dan kegiatan dapat diterima masyarakat. 4 (empat) kategori termasuk kategori cukup, yaitu: Hasil produk dapat dipasarkan, Dapat memenuhi kebutuhan dasar, Cara-cara sudah dikenal oleh masyarakat, Disesuaikan dengan potensi dan kondisi. Yang termasuk dalam kategori kurang terdapat 4 (empat) kategori, yaitu : Ada pembinaan secara khusus, Cepat menghasilkan, Mendayagunakan potensi yang ada, Hasil dapat digulirkan.

Sedangkan dari hasil regresi dapat diketahui bahwa dimensi kriteria kegiatan dalam pelaksanaan P2LEP memiliki hubungan positif yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai koefisien regresi dimensi kriteria kegiatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,019 maka dapat dikatakan arah kecenderungan adalah: pada setiap terjadi penambahan/peningkatan pada dimensi kriteria kegiatan juga akan memberikan pengaruh peningkatan sebesar 0,019 kali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Pengawasan dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Dari hasil sebagian besar tanggapan responden pada dimensi pengawasan dari 2 indikator dan 3 item pertanyaan, terlihat hanya 1 indikator yang termasuk pada kategori tinggi yaitu: untuk kegiatan kelompok masyarakat benar sesuai dengan prinsip pokok dan kriteria kegiatan sehingga diperlukan adanya Pengawasan. Sedangkan 2 indikator termasuk pada kategori kurang yaitu: Selama ini dilakukan pengawasan oleh Dinas /Instansi yang seharusnya melakukan pengawasan dan pembinaan dan Pengawasan dan pembinaan selalu dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait secara terus-menerus.

Sejalan dengan hasil regresi dapat diketahui bahwa dimensi pengawasan dalam pelaksanaan Program menunjukkan angka koefisien yang lebih rendah dari Prinsip Pokok dan Kriteria kegiatan. Dengan nilai koefisien regresi dimensi pengawasan sebesar 0,014 maka dapat dikatakan arah kecenderungan adalah: pada setiap terjadi penambahan/peningkatan pada dimensi pengawasan juga akan memberikan pengaruh peningkatan sebesar 0,014 kali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Prinsip Pokok, Kriteria Kegiatan dan Pengawasan secara bersama-sama dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Dimensi Prinsip Pokok, kriteria Kegiatan dan Pengawasan dalam variabel pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terbukti secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Nilai koefisien determinasi seluruh dimensi variabel Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Peserta adalah sebesar 0,673. Nilai ini dapat ditafsirkan bahwa kontribusi dari dimensi variabel Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Peserta adalah sebesar 67,30 %, sedangkan kontribusi yang diberikan oleh variabel atau faktor lain diluar alokasi Pelaksanaan P2LEP adalah sebesar 32,70 %.

Sementara jika dilihat dari nilai koefisien determinasi pasangan ketiga dimensi adalah 0,683. namun untuk jumlah variabel bebas lebih dari dua, lebih baik digunakan Adjusted R square, sebesar 0,673 (67,3%). Jadi dapat dikatakan bahwa kontribusi dari dimensi prinsip-prinsip pokok, kriteria kegiatan serta pengawasan terhadap variabel peningkatan kesejahteraan peserta adalah 67,3%. Sedangkan sisanya sebesar 32,7% perubahan yang terjadi pada peningkatan kesejahteraan peserta disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dan tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan pada Bab terdahulu, diketahui rumus persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3;$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 ;$$

Dan dari hasil penelitian diketahui nilai a dan b₁, b₂ serta b₃, sehingga diperoleh persamaan regresi hasil penelitian sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 7,906 + 0,220X_1 + 0,019X_2 + 0,014X_3$$

Setelah melalui uji statistik t (uji parsial) terhadap masing-masing variabel independen dan uji statistik F (uji secara bersama-sama) ketiga variabel tersebut serta koefisien determinasi (R²) seperti yang telah diuraikan tersebut, maka goodness of fit persamaan tersebut tersebut telah teruji. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan nilai dari b₁, b₂, b₃ tersebut bahwa setiap terjadi pertambahan atau peningkatan dari nilai dimensi X₁ (Prinsip Pokok) akan mempengaruhi secara positif peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta sebesar 0,220 kali. Begitu juga dengan dimensi X₂ (kriteria kegiatan) dan X₃ (pengawasan), yang apabila mengalami pertambahan/peningkatan nilai maka akan menyumbang penambahan dan peningkatan terhadap variabel peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta masing-masing sebesar 0,019 dan 0,014 kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik dimensi prinsip pokok, kriteria kegiatan dan pengawasan dalam variabel pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan maka peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta akan cenderung meningkat, yang berarti ada pengaruh positif antara Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan demikian hal ini membuktikan secara empirik hipotesis penelitian secara bersama-sama bahwa ada pengaruh prinsip pokok, kriteria kegiatan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun pengaruh dari masing-masing dimensi variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.34. tersebut, untuk dimensi prinsip pokok diketahui 0,316, dimensi kriteria kegiatan 0,041 dan dimensi pengawasan 0,011. dapat disimpulkan dari ketiga dimensi yang digambarkan dalam penelitian ini dimensi Prinsip Pokok yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta. Dengan kata lain bahwa dengan lebih fokus pada dimensi Prinsip Pokok pada Pelaksanaan Program

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (P2LEP) akan menyebabkan peningkatan yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta dibandingkan dua dimensi lainnya. Meskipun begitu, dengan adanya nilai a sebesar 7,906 dapat ditafsirkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta sudah berada pada titik konstan sebesar 7,906.

Berdasarkan analisis tersebut, memberikan indikasi yang cukup akan adanya pengaruh Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta. Pengaruh tersebut membentuk pola hubungan linier yang bersifat positif, yaitu semakin baik Pelaksanaan pemberdayaan melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan maka tingkat kesejahteraan masyarakat peserta akan semakin meningkat pula.

Adapun pengaruh pelaksanaan program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat digambarkan dengan meningkatnya kemandirian masyarakat didalam pengadaan modal usaha, kemandirian dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan, kemandirian didalam peningkatan peluang untuk mendapatkan pekerjaan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan:

Pertama, Prinsip Pokok dalam Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta adalah diterima. Dengan melihat jawaban responden terhadap variabel Prinsip Pokok mengindikasikan bahwa semakin konsisten berpedoman kepada Prinsip-prinsip pokok pelaksanaan pemberdayaan masyarakat maka berpengaruh terhadap berkembangnya usaha peningkatan pendapatan dan meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat peserta yang merupakan dasar dari kesejahteraan masyarakat peserta dalam kebutuhan hidup. Begitu juga dengan hasil analisis statistik dimana ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi dimensi prinsip pokok terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,220 maka dapat dikatakan arah kecenderungan adalah: pada setiap terjadi penambahan/peningkatan pada dimensi prinsip pokok juga akan memberikan pengaruh peningkatan kesejahteraan sebesar 0,220 kali.

Kedua, Kriteria kegiatan dalam Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta adalah diterima. Dengan melihat jawaban responden terhadap variabel Kriteria Kegiatan yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, mengindikasikan bahwa semakin konsisten berpedoman kepada Kriteria Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat maka berpengaruh terhadap berkembangnya usaha peningkatan pendapatan dan meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat peserta yang merupakan dasar dari kesejahteraan masyarakat peserta dalam kebutuhan hidup. Demikian juga dengan hasil analisis secara statistik ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi dimensi kriteria kegiatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,019 maka dapat dikatakan arah kecenderungan adalah: pada setiap terjadi penambahan/peningkatan pada dimensi prinsip pokok juga akan memberikan pengaruh peningkatan kesejahteraan sebesar 0,019 kali.

Pengaruh ini utama dikarenakan masyarakat peserta sudah berpedoman kepada panduan pelaksanaan program antara lain: Pembentukan Kelompok berdasar kebutuhan, dihindari pembentukan kelompok yang dipaksakan dan dalam kelompok masyarakat peserta diselenggarakan kegiatan sosial ekonomi yaitu: usaha produktif, pemupukan modal dan penghimpunan tabungan sehingga memberikan manfaat secara ekonomis bagi seluruh anggota kelompok secara lestari dan berkelanjutan, sehingga berpengaruh terhadap berkembangnya usaha peningkatan pendapatan dan meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat peserta yang merupakan dasar dari kesejahteraan masyarakat peserta dalam kebutuhan hidup.

Ketiga, pengawasan dalam Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta adalah diterima. Dengan nilai koefisien regresi dimensi prinsip pokok terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,014 maka dapat dikatakan arah kecenderungan adalah : pada setiap terjadi penambahan/peningkatan pada dimensi pengawasan juga akan memberikan pengaruh peningkatan kesejahteraan sebesar 0,014 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa agar kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat benar-benar sesuai dengan Prinsip Pokok dan Kriteria Kegiatan diperlukan adanya pengawasan sehingga Hal ini

untuk menjamin agar pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat sehingga tidak ada pelanggaran baik dari aspek substantif maupun administratif, (Prasojo, 2003: 15).

B. Saran-saran.

Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta merupakan ukuran keberhasilan Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan berdasar hasil penelitian disarankan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat peserta mutlak masih diperlukan pembinaan secara khusus yang berhubungan dengan kegiatan Usaha.

Kedua, untuk meningkatkan pelayanan P2LEP kepada masyarakat, maka perlu adanya peningkatan kualitas kerja Pendamping yaitu menuju ke arah yang profesional, karena pendamping sebagai unsur perekat antara ekosistem tradisional dan modern sehingga dapat terjadi transformasi ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Ketiga, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru selaku Pengelola Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan perlu lebih aktif lagi dalam melakukan Sosialisasi Program ke masyarakat, melakukan Pelatihan Bagi Aparat dan Masyarakat serta Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan sehingga Tujuan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta di kecamatan rumbai Kota Pekanbaru benar-benar mencapai Tujuan dan Sasaran.

REFERENSI

Buku

- Al-Rasyid, Harun, (1994), *Statistika Sosial* (Penyunting: Teguh Kismantoroadji), Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin, (2004), *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan, STIE YPKN .
- Arsyad, Lincolin, (2006), "How do Microfinance institutions Cope With Risk and Uncertainty?" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 21, No. 1, 22-36
- Asian Development Bank, (2005), *Meningkatkan Perjuangan Melawan Kemiskinan di Asia dan Pasifik, Strategi Pengurangan Kemiskinan Asia Development Bank*, Asian Development Bank, Juni 2005.
- Badan Pusat Statistik, (2006), *Pekanbaru Dalam Angka 2005/2006*, Kerjasama BPS Kota Pekanbaru dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik, (2006), *Pekanbaru Dalam Angka 2005*, Kerjasama BPS Kota Pekanbaru dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik, (2006), *Pendapatan Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001-2005*, Kerjasama BPS Kota Pekanbaru dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
- BPMKB, 2006, "Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kota Pekanbaru 2006", Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Bird, Richard and R. Rodriguez, Edgard, (1999), "Decentralization And Poverty Alleviation. International experience and the case of the Philippines", *Public Administration and Development*, The World Bank, Washington,D.C.
- Cheema, G. Shabbir and Rondinelli, Dennis A., (1983), "DECENTRALIZATION and

- DEVELOPMENT Policy Implementation in Developing Countries”, Sage Publication Beverly Hills/London/New Delhi.
- Creswell, Jhon, W. (1994), *Research Design : Qualitative & Quantitative Approaches*, Thousand Oaks California, Sage Publication Inc .
- Friedman, John, (1992), *Empowerment : The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell,
- Gulford, J.P. (1956), *Fundamental Statistics In Psycology and Education*, Tokyo : Mc. Graw-Hill.
- Kartasasmita, Ginanjar, (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, CIDES.
- Kountur, Ronny. J., (2005), *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta, Penerbit PPM.
- Khairuddin, (1992), *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Liberty.
- Kuncoro Mundrajad, (2004), *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Kedua, Yogyakarta, UPP AMP YPKN.
- Kusnaka Adimihardja (2001), *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*, Bandung: Humaniora.
- Malarangreng, Andi. A., (2000), *Otonomi Daerah Dalam Perspektif, Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta, Bigraf.
- Manz, Charles C., and Sims. Jr, Henry P, (2001), *The New SuperLeadership: Leading Others To Lead Themselves*, Berret-Koehler Publishers, Inc, San Francisco.
- Mubyarto (1994), *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, LP3ES.
- Mubyarto (1995), *Ekonomi dan Keadilan Sosial* , Yogyakarta, Aditya Media.
- Nazir, Mohammad, (1998), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, (1990), *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Pranarka dan Vidyandika M. (1996). “Pemberdayaan” dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (Ed.) Jakarta: CSIS.
- Probst, Gilbert. et al, (2000), *MANAGING KNOWLEDGE: Building Block For Succes*, New York, USA.
- Robert M. Kaplan & Dennis P. Saccuzzo, (1993), *Phsycological Testing principles, application, and issues*; Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California.
- R. Harry Hikmat (2001), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- R. Wrihatmolo, Randi dan Dwidjowojoto, Riant Nugroho, (2007), *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Elex Media Komputindo, Gramedia – Jakarta.
- Saputra. Dr, Lyndon (Editor), (2002), *Buku Pegangan DISIPLIN KELIMA (The Fifth Discipline Fieldbook) Strategi dan Alat-alat untuk Membangun Organisasi Pembelajaran, Interaksara*, Batam Centre.
- Sen, Amartya, (1999), *Development as Freedom*. Oxford University Press. New York.
- Sevilla et.all, (1993), *Pengantar Metode Penelitian.* Terjemahan : Alimuddin Tuwu, Jakarta, UI Press.
- Siagian, Sondang. P, (1990), *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung.
- Siagian, Sondang.P. (1998), *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional* , Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, (1998), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.
- Sinulingga, Budi, D. (1999), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.

- STIA LAN Bandung, 2007, PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH, makalah dan tesis, Bandung.
- Stoker, Gerry, (1988), *The Politics Of Local Government*, MacMilland Education, LTD, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London.
- Sugiyono, (2006), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno, (1990), *Pengantar Penelitian Ilmiah (Metode dan Teknik)*, Bandung, IKIP.
- Sumodiningrat, Gunawan, (1998), *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Syahtuti, (2006), *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian, penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel*, Jakarta : Bina Rena Pariwara.
- Tulus T.H Tambunan (2003), *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Todaro, M.P, (2004), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (H.Munandar, trans.Edisi kedelapan), Jakarta, Erlangga.
- Uphoff dan Cohen, (1997), *Rural Development Participation : Concept and Measures For Project Design, Implementation dan Evaluation*, Rural Development Committee, Cornell University, New York.
- Widarjono, Agus, 2005, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor: 42/2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Surat Mendagri Nomor: 412.6/2179/SJ Tahun 2006, perihal Panduan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.
- Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 98 Tahun 2006, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2006.
- Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 04 Tahun 2006, tanggal 02 Maret 2006, tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006.

Jurnal/Artikel

- Eko Prasajo, Mag.rer.publ, (2003), "People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik", Resume hasil penelitian penulis dan tim Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik (PKSPSP) FISIP UI tahun 2003 dalam literatur research dengan judul "Pola dan Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta".
- Sumodiningrat, Gunawan. (2001), *Kepemimpinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta. 17 Maret 2001.
- Sumodiningrat, Gunawan, (2003), *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah*, Artikel - Th. II - No. 1 - Maret 2003, www.ekonomirakyat.org

Makalah

- Budiman. (2003), "PEMBERDAYAAN: KAJIAN TEORITIS", *Majalah Ekonomi dan Komputer* No.2 Tahun XI-2003, Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma.

Kartasasmita, Ginanjar, (1997), Makalah: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur Surabaya, 14 Maret 1997.

Dokumen

Trilestari, Endang Wirjatmi, (2007), Hand-out Perkuliahan: Kajian Teori Ilmu Administrasi: " Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Government) dan Tata Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Implementasi Otonomi Daerah", Bandung, STIA LAN.

Trilestari, Endang Wirjatmi, (2007), Hand-out Perkuliahan: Kajian Teori Ilmu Administrasi, " Learning Organization", Bandung, STIA LAN.

Sumahdumin, Dudung, (2007), Hand-out Perkuliahan: Manajemen Pembangunan Kota dan Desa, Bandung, STIA LAN.

Indonesia adalah salah satu negara yang masih termasuk negara berkembang di Asia. Ada anggapan bahwa negara berkembang identik dengan kemiskinan. Jadi, apabila ada negara yang masih termasuk kategori berkembang maka negara tersebut mengandung kemiskinan dimana-mana, baik di kota maupun didesa. Kemiskinan tidak memilih-milih tempat, tidak peduli kota besar atau desa terpencil, sebagai contoh kota Jakarta. Kota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang menjadi pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat tempat hiburan dan lain sebagainya yang berarti pusat perkonomian Indonesia, tempat keluar-masuknya uang, selain kota-kota besar lain di negara ini pun tidak terlepas dari kemiskinan. Kita dapat melihat di setiap kota pasti ada daerah yang perumahannya kumuh, berhimpitan satu dengan yang lain, atau pula ada penduduk yang mendirikan rumah alakadarnya di bawah jembatan tol dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan masyarakat miskin perkotaan.

Pemberdayaan merupakan isu yang berkembang pesat pada periode tahun 2000-an ini. Disatu sisi Pemberdayaan dilihat sebagai bagian dari proses ekonomi, akan tetapi disisi lain pemberdayaan sebenarnya mencakup berbagai segi kehidupan yang ada. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan.

Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu direorientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat atau petani dipedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan "put the farmers first". Menurut Nasikun (2000:27) "paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya".

Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan dan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan dengan lebih kokoh. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta berkelanjutan.

Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting. Sesuai dengan visi Community Empowerment for Rural Development (CERD) yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri, pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan didesanya secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan (CERD, 2004). Sekarang saatnya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru tersebut dengan tetap diiringi dan dipantau oleh monitoring dari pihak terkait untuk menjaga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memandirikan masyarakat sesuai yang dicanangkan sejak awal. Proses pemberdayaan masyarakat yang efisien akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha maupun pihak yang peduli kepada masyarakat harus dipandang sebagai pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat dengan memuat lima hal pokok, sebagaimana dijelaskan Kartasmita (1994: 49) sebagai berikut:

- a. Adanya bantuan dana sebagai modal usaha.
- b. Adanya pembangunan prasarana sebagai mendukung kegiatan sosial.
- c. Adanya penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi.
- d. Adanya pelatihan bagi Aparat dan masyarakat.
- e. Adanya penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Terdapat 21 macam Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006, namun yang menjadi sorotan penulis guna diadakan penelitian lebih lanjut adalah pada Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dimana kegiatan ini dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sebagai leading sektor Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kota Pekanbaru.

Sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Prinsip Pokok dalam Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta ?
- b. Bagaimana Kriteria Kegiatan dalam Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta ?
- c. Bagaimana Pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta ?

D. Hipotesis.

Menurut Sugiyono (2006; 70), hipotesis adalah: “merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Sehingga berdasar rumusan masalah tersebut, maka hipotesis kerja dan hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis Kerja:

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan yaitu Prinsip pokok, Kriteria kegiatan dan Pengawasan Kegiatan.

Sebagai Hipotesis Statistik:

H₀ : Prinsip pokok, Kriteria kegiatan dan Pengawasan **tidak berpengaruh** terhadap keberhasilan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

14

H_a : Prinsip pokok, Kriteria kegiatan dan Pengawasan **berpengaruh**

terhadap keberhasilan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: mengetahui dan memahami Pengaruh Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peserta di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat bagi kepentingan Dunia Akademik.

Diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, dalam kaitannya dengan teori dan ilmu Manajemen Pembangunan Daerah, khususnya terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, sebagai bentuk kebijakan pembangunan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat Bagi Dunia Praktis.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat disumbangkan saran-saran konstruktif untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, sehingga dapat dijadikan masukan yang positif bagi instansi, lembaga, organisasi pengelola dan pelaksana serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

15

Dijepang, Ikujiro Nonaka, dalam "Management Dynamism and Managerial Productivity" (June, 1991) muncul dengan pandangan mengenai inovasi sebagai suatu proses penciptaan pengetahuan dalam organisasional (organizational knowledge creation).

Nonaka (1991) menekankan pentingnya interaksi dalam organisasi antara tingkat puncak, menengah dan bawah serta sekaligus peranan manajemen menengah yang berkompentensi dalam penciptaan pengetahuan. Selanjutnya Nonaka menyebut adanya dua bentuk pengetahuan, yaitu:

1. yang tidak terucapkan / terungkap (tacit), dan

2. yang dinyatakan / diungkapkan secara eksplisit atau articulable.

Pengetahuan yang nyata (articulable) berkenaan dengan pengetahuan yang dialihkan (transmittable) atau sistematis. Sedangkan pengetahuan yang tidak terungkap (tacit) adalah bersifat pribadi yang sulit diformulasikan dan tidak mudah dikomunikasikan. Pengetahuan yang tidak terucapkan (tacit) itu dapat dibagi lagi kedalam dua jenis: know how (atau aspek prosedural)

26

dan semacam frame of reference yang oleh para psikolog dikenal sebagai Mental Models yang mencakup paradigma atau kepercayaan tradisional. Penciptaan pengetahuan yang lebih bermakna terjadi karena adanya interaksi antara yang tidak terucapkan (tacit) dan yang nyata (articulable) yang memerlukan penyesuaian yang dinamis pada keadaan dan memainkan peranan dalam kemampuan organisasi untuk bisa bertahan dan tumbuh

kembang. Proses interaksi ini terjadi dalam diri setiap individu sebagai sumber daya manusia organisasi community development dan peranan manajemen menengah menjadi penggerak, fasilitator dalam penciptaan pengetahuan. Pendekatan middle-up-down management dapat memberi kontribusi pada pemanfaatan penuh dalam penciptaan pengetahuan. Kesetaraan dalam penciptaan pengetahuan antara top-middle-down makin berkembang, dengan top-middle-down management itu memungkinkan terjadinya arus informasi yang komprehensif dan terfokus.

Sehingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada prakarsa masyarakat setempat (local initiative) terutama disektor ekonomi dengan pengetahuan lokalnya dengan bantuan berkala dari pemerintah atau institusi lainnya sebagai model penyelenggaraan program spesifik yang berdasarkan hak, kesempatan, kewenangan komunitas untuk mengurus diri sendiri sesuai dengan kemampuan sumber-sumber ekonomi setempat dan bantuan teknis finansial pihak lain yang bersifat sementara, (Setiarso, 2007: 14).

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Kondisi Geografis.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632,26 km² dan secara astronomis terletak diantara 101o14'-101o34' bujur timur dan 0o25'-0045' lintang utara. Dibagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, dibagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, sedangkan dibagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Selain berada ditengah Provinsi Riau, Pekanbaru juga berada dilintasan jalur transportasi darat Pulau Sumatera. Sebagaimana daerah tropis lainnya, Pekanbaru mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2004 jumlah hari hujan di Kota Pekanbaru sebanyak 209 hari, dengan curah hujan rata-rata 306,99 mm dan temperatur berkisar antara minimum 26,9° C sampai dengan maksimum 26,3° C (Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, tahun 2004).

Secara administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru dikepalai oleh Walikota, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 dimekarkan dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadi 12 wilayah administrasi kecamatan. Wilayah administrasi kecamatan selanjutnya terbagi lagi menjadi kelurahan, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003, dimekarkan dari 50 wilayah administrasi kelurahan menjadi 58 wilayah administrasi kelurahan. Wilayah administrasi kelurahan terbagi lagi menjadi 539 Rukun Warga (RW) dan 2.266 Rukun Tetangga (RT). Populasi Penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2005 menurut Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru mencapai 704.517 jiwa. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk Kota Pekanbaru lebih kurang 1.125 jiwa/km².

63

2. Perekonomian Daerah.

a. Kondisi Makro Ekonomi.

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran nilai PDRB ini secara nyata

mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, perkembangan perekonomian Kota Pekanbaru tahun 2001-2004 menunjukkan angka yang cukup positif, masing-masing sebesar 10,74 persen (2001), 9,78 persen (2002), 10,87 persen (2003), dan 12,22 persen (2004). Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1.

Secara umum peranan sektoral perekonomian Kota Pekanbaru pada tahun 2001-2004 rata-rata didominasi oleh sektor tersier, kemudian diikuti oleh sektor sekunder sekunder. Bersarnya peranan sektor tersier tersebut disumbang oleh (i) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (19,27%), (ii) sektor pengangkutan dan komunikasi (14,04%), (iii) sektor jasa-jasa (9,30%) dan (iv) sektor perdagangan, hotel dan restoran (8,25%). Adapun peranan sektor sekunder terutama disumbang oleh sektor konstruksi (14,26%).

64

Tabel 4.1.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2001-2004

Tabel 4.1.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2001-2004

No	SEKTOR	Tahun				Rata-rata
		2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sektor Primer					
	Pertanian	6,62	5,48	3,95	5,99	5,51
	Pertambangan dan Penggalian	10,51	10,20	8,86	19,45	12,26
2	Sektor Sekunder					
	Industri Pengolahan	9,65	9,05	10,86	13,48	10,76
	Listrik, Gas dan Air bersih	5,18	4,35	4,55	5,16	4,81
	Konstruksi	14,12	14,29	12,70	15,94	14,26
3	Sektor Tersier					
	Perdagangan Hotel dan Restoran	11,56	6,12	10,05	5,25	8,25
	Pengangkutan dan Komunikasi	9,20	12,75	15,08	19,23	14,04
	Keuangan, Persewaan dan Jasa	12,51	17,24	13,53	33,78	19,27
	Perusahaan Jasa-Jasa	9,09	9,18	8,29	10,63	9,30
PDRB	10,74	9,78	10,87	12,22	10,90	

Sumber: Pendapatan Regional Kota Pekanbaru menurut Lapangan Usaha tahun 2001-2004

Perkembangan sektor perdagangan dan jasa (tersier) di Kota Pekanbaru dalam beberapa tahun terakhir tampaknya semakin dominan apabila dibandingkan dengan dua sektor lainnya (primer dan sekunder), baik dilihat dari sisi peranan maupun pertumbuhannya. Dengan demikian berbagai aktivitas yang ada dalam sektor tersier kedepan tampaknya akan memiliki trend yang cukup prospektif.

Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Data lima tahun terakhir menunjukkan adanya trend peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kota Pekanbaru. Secara lengkap gambaran tentang PDRB dan nilai PDRB perkapita di Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir (2001-2005) dapat dilihat pada tabel 4.2

dibawah ini.

65

Tabel 4.2.

PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha 2001-2005

(dalam jutaan rupiah)

Tabel 4.2.
PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha 2001-2005
(dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	85.914,86	66.328,10	63.515,20	66.342,17	162.487,26
Pertumbuhan (%)	(-)	(3,14)	(3,85)	(5,10)	(4,21)
2. Pertambangan & Pengalihan	1.289,46	1.406,48	1.531,87	1.736,91	1.853,07
Pertumbuhan (%)	(-)	(9,23)	(7,34)	(15,02)	(6,57)
3. Industri Pengolahan	464.574,25	582.815,80	546.925,85	606.067,75	653.863,13
Pertumbuhan (%)	(-)	(8,25)	(8,15)	(10,41)	(7,90)
4. Listrik, Gas dan Air minum	84.908,25	67.583,20	78.299,93	73.587,11	78.412,63
Pertumbuhan (%)	(-)	(4,13)	(4,15)	(4,53)	(3,04)
5. Bangunan	861.255,85	744.639,21	817.681,10	910.021,80	988.736,31
Pertumbuhan (%)	(-)	(12,52)	(9,62)	(11,29)	(8,09)
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.125.369,63	1.187.143,41	1.388.469,70	1.341.507,68	1.447.759,70
Pertumbuhan (%)	(-)	(3,49)	(13,64)	(4,11)	(7,92)
7. Pengangkutan dan Komunikasi	942.434,07	685.770,54	680.640,66	775.672,47	944.787,88
Pertumbuhan (%)	(-)	(11,68)	(12,35)	(13,96)	(8,91)
8. Keuangan, Persewaan & jasa Pim.	849.041,37	179.892,19	213.515,43	271.538,02	338.332,42
Pertumbuhan (%)	(-)	(18,71)	(18,85)	(23,58)	(24,07)
9. Jasa-jasa	736.204,30	768.120,44	854.078,07	925.949,39	965.891,36
Pertumbuhan (%)	(-)	(8,41)	(7,60)	(8,40)	(7,53)
PDRB	3.331.893,04	4.176.821,16	4.588.757,09	5.304.318,21	5.858.933,15
Suku-suku Pertumbuhan (%)	(-)	(9,09)	(9,38)	(9,30)	(9,91)

Sumber: Pekanbaru dalam Angka 2006.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari adanya perkembangan beberapa indikator prekonomian Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan tersebut adalah perkembangan perekonomian Kota Pekanbaru pada saat ini terutama dipengaruhi oleh sektor tersier, dalam hal ini sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Pada masa yang akan datang perkembangan kota diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh sektor tersier yang meliputi bidang perdagangan dan jasa. Hal ini selaras dengan keterbatasan Kota Pekanbaru akan sumber daya alam, baik yang diperbaharui (renewable natural resources) maupun tidak diperbaharui (unrenewable natural resources), namun Kota Pekanbaru mempunyai lokasi yang strategis sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya yang merupakan daerah penghasil minyak bumi, perkebunan dan kelapa sawit dan lain-lain yang bernilai ekonomi tinggi. Kota Pekanbaru harus dapat berkembang menjadi kota yang mempunyai kemampuan menyediakan jasa dan pelayanan yang optimal dengan biaya yang relatif murah, sehingga mampu bersaing dengan kotakota lain yang juga akan berkembang ditingkat lokal maupun regional.

66

b. Kondisi Keuangan Daerah.

Dibidang keuangan daerah, pendapatan Kota Pekanbaru selama 5 tahun terakhir baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami peningkatan yaitu dari Rp.346.226.974.774,- (2001), menjadi Rp.833.930.921.527,- (2005), atau rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 24,67 % (Sumber Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, 2006). Peningkatan pendapatan daerah yang relatif besar terjadi sejak tahun 2001 sebagai dampak dilaksanakannya otonomi daerah sebagai amanat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 23 Tahun

1999 tentang Keuangan Daerah.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun selama 5 tahun terakhir peranannya masih pada posisi ke-2 setelah Dana Perimbangan, namun tetap memiliki perkembangan (trend) yang terus meningkat dari tahun ketahun, yaitu: dari Rp. 37.615.518.829 pada tahun 2001, menjadi Rp. 86.945.155.571,- pada tahun 2005, dan kenaikan tersebut lebih didorong oleh adanya kenaikan yang dialami oleh hampir seluruh sub-sub komponen yang ada didalam PAD, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah, kecuali untuk sub komponen Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir.

Untuk komponen dana perimbangan, peranannya selama 5 tahun terakhir ikut membentuk total Pendapatan daerah cenderung menunjukkan peningkatan, yaitu dari Rp.302.391.655.079.- pada tahun 2001 menjadi Rp. 604.549.843.045,- pada tahun 2005. peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan hampir semua unsur Dana Perimbangan yaitu: Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum.

Gambaran realisasi dan komposisi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (2001-2005) dapat dilihat pada tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3.

Realisasi dan Komposisi Keuangan Daerah – Aspek Pendapatan

Tabel 4.3.
Realisasi dan Komposisi Keuangan Daerah – Aspek Pendapatan

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2001	2002	2003	2004	2005
I	Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Yang Lalu	3.042.309.267	44.286.708.744	47.853.232.035	73.373.886.382	142.435.522.811
II	Bagian PAD:	37.615.518.829	48.294.830.504	48.294.830.504	48.294.830.504	86.945.155.571
1.	Pajak Daerah:	17.286.890.241	22.727.370.016	22.727.370.016	22.727.370.016	46.746.678.281
2.	Retribusi Daerah:	18.565.827.173	21.305.755.598	21.305.755.598	21.305.755.598	29.243.571.390
3.	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	183.134.660	782.553.500	782.553.500	782.553.500	533.426.170
4.	Lain-lain PAD Yang Sah:	1.582.896.812	3.479.142.387	3.479.142.387	3.479.142.387	10.422.478.825
III	Bagian Dana Perimbangan:	302.391.655.079	293.499.114.079	293.499.114.079	293.499.114.079	604.549.843.045
1.	Bagi Hasil Pajak:	44.082.947.701	48.592.244.083	48.592.244.083	48.592.244.083	86.930.524.281
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak:	113.679.187.318	96.794.314.306	96.794.314.306	96.794.314.306	280.206.032.054
3.	Dana Alokasi Umum:	143.067.590.000	144.171.424.500	144.171.424.500	144.171.424.500	183.466.083.000
4.	Dana Alokasi Khusus:	1.632.899.060	973.132.000	973.132.000	973.132.000	2.089.189.390
IV	Bagian Pengisian Pemindah Daerah:	-	-	-	-	-
V	Bagian Lain-Lain Persewaan yang Sah, Persewaan dari Propinsi, Dana Keringanan/Perimbangan dari Pemindah Pusat (ADHOC):	2.277.481.606	27.246.107.117	17.861.569.077	11.456.885.534	-
	TOTAL	346.328.824.724	413.429.851.144	412.142.437.707	400.800.014.388	871.830.591.527
	Realisasi (%)	100%	117,4%	119,4%	115,5%	250,8%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, 2006.

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang relatif konsisten yaitu rata-rata 23,34 persen pertahun selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Dana perimbangan dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA). Namun untuk jangka panjang sumber pendapatan ini bisa menurun mengingat Sumber Daya Alam diProvinsi Riau yang utama

adalah minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unerenewable natural resources), sehingga pada waktunya nanti akan habis. Berpijak dari hal tersebut kedepan, komponen dana perimbangan akan sangat ditentukan oleh Pos Bagi Hasil Pajak.

3. Keadaan Sistem Pemerintahan.

a. Visi dan Misi

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan dimasa yang akan datang akan berlangsung pada skala dan kompleksitas yang lebih tinggi daripada

68 yang telah ijalakan selama ini. Untuk itu diperlukan peningkatan skala dan eksensitas hubungan inter-organisasional baik antara sesama instansi pemerintah pada berbagai tingkatan, maupun antara pemerintah dengan dunia usaha.

Berdasarkan keadaan tersebut, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi saat ini maupun dimasa yang akan datang, pemerintah dituntut untuk mencapai Visi Kota Pekanbaru, yakni: Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju Masyarakat Sejahtera yang berlandaskan iman dan Taqwa. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya dimasa yang akan datang. Artinya visi tersebut didukung dengan misi yang akan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang memadai dan kualitas llingkungan kota serta penataan ruang yang terintegrasi.
3. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan umum dan aga yang berkualitas dan terjangkau, pengembangan kehidupan beragama dan budaya melayu.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota, serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat.

b. Kecamatan

Secara rinci mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam tabel 4.4. dibawah ini.

69
Tabel 4.4.

Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah PendudukKota Pekanbaru
Keadaan Akhir Tahun 2005

Tabel 4.4.
Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru
Keadaan Akhir Tahun 2005

Kecamatan	Luas		Penduduk	
	KM2	%	Jumlah	%
1. Tampan	59,81	9,46	89.294	12,67
2. Payung Sekaki	43,24	6,84	67.878	9,63
3. Bukit Raya	22,05	3,49	73.793	10,47
4. Marpoyan Damai	29,74	4,70	97.276	13,80
5. Tenayan Raya	171,27	27,09	83.210	11,81
6. Lima Puluh	4,04	0,64	43.166	6,12
7. Sail	3,26	0,52	23.835	3,39
8. Pekanbaru Kota	2,26	0,36	28.332	4,02
9. Sukajadi	3,76	0,59	47.468	6,76
10. Senapelan	6,65	1,05	39.064	5,54
11. Rumbai	128,85	20,38	56.115	7,97
12. Rumbai Pesisir	157,33	24,88	55.086	7,82
Jumlah	632,26	100,00	704.517	100,00

Sumber: Pekanbaru dalam angka 2006 (Kerjasama Bappeda Kota Pekanbaru dengan BPS Kota Pekanbaru).

Dari tabel tersebut dapat dilihat, wilayah yang paling luas yaitu 171,27 Km adalah Kecamatan Tenayan Raya dan wilayah yang paling sempit yaitu 2,26 Km adalah Kecamatan Pekanbaru Kota.

Dari jumlah Penduduk akhir tahun 2005 adalah sebanyak 704.517 jiwa, penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Marpoyan Damai yaitu sebanyak 97.276 jiwa dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Sail yaitu sebanyak 23.835 jiwa. Berdasarkan data Pekanbaru dalam angka pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan dengan tingkat pertumbuhan 4,5 % pertahun. Berdasarkan registrasi penduduk dari Kecamatan dan Kelurahan tahun 2005 mencapai jumlah 704.517 orang dengan komposisi 357.190 orang laki-laki atau 50,7 % dan perempuan 347.326 orang atau 49,3 %.

Dari tabel tersebut dapat dilihat, wilayah yang paling luas yaitu 171,27 Km adalah Kecamatan Tenayan Raya dan wilayah yang paling sempit yaitu 2,26 Km adalah Kecamatan Pekanbaru Kota.

70

Dari jumlah Penduduk akhir tahun 2005 adalah sebanyak 704.517 jiwa, penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Marpoyan Damai yaitu sebanyak 97.276 jiwa dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Sail yaitu sebanyak 23.835 jiwa.

Berdasarkan registrasi penduduk dari Kecamatan dan Kelurahan tahun 2005 mencapai jumlah 704.517 orang dengan komposisi 357.190 orang lakilaki atau 50,7 % dan perempuan 347.326 orang atau 49,3 %.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 jumlah Kecamatan yang semula 8 Kecamatan dimekarkan menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan dari semula 45 Kelurahan menjadi 58 Kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel. 4.5.

Nama-nama Desa/Kelurahan Dirinci menurut Status dan Kecamatan Tahun 2005

Tabel. 4.5.
Nama-nama Desa/Kelurahan Dirinci menurut Status dan Kecamatan Tahun
2005

Kecamatan (1)	Desa/Kelurahan (2)	Status Pemerintahan (3)
01. Tampen	001. Simpang Baru	Kelurahan
	002. Sidomulyo Barat	Kelurahan
	003. Tuah Karya	Kelurahan
	004. Delima	Kelurahan
02. Payung Sekaki	001. Labuh Baru Timur	Kelurahan
	002. Tampen	Kelurahan
	003. Air hitam	Kelurahan
	004. Labuh Baru Barat	Kelurahan
03. Bukit Raya	001. Simpang Tiga	Kelurahan
	002. Tangkerang Selatan	Kelurahan
	003. Tangkerang Utara	Kelurahan
	004. Tangkerang Labuai	Kelurahan
04. Marpoyan Damai	001. Tangkerang Tengah	Kelurahan
	002. Tangkerang Barat	Kelurahan
	003. Maharabu	Kelurahan
	004. Sidomulyo Timur	Kelurahan
05. Tenayan Raya	005. Wonorejo	Kelurahan
	001. Kulim	Kelurahan
	002. Tangkerang Timur	Kelurahan
	003. Rejosari	Kelurahan
	004. Sail	Kelurahan
06. Lima Puluh	001. Rintis	Kelurahan
	002. Sekip	Kelurahan
	003. Tanjung Rhu	Kelurahan
	004. Pesisir	Kelurahan

Kecamatan (1)	Desa/Kelurahan (2)	Status Pemerintahan (3)
07. Sail	001. Cinta Raja	Kelurahan
08. Pekanbaru Kota	002. Sukamaju	Kelurahan
	003. Sukamulia	Kelurahan
	001. Simpang Empat	Kelurahan
	002. Sumahilang	Kelurahan
	003. Tanah Datar	Kelurahan
09. Sukajadi	004. Kota Baru	Kelurahan
	005. Sukaramai	Kelurahan
	006. Kota Tinggi	Kelurahan
	001. Jadirejo	Kelurahan
	002. Kampung Tengah	Kelurahan
	003. Kampung Melayu	Kelurahan
	004. Kedungsari	Kelurahan
10. Senapelan	005. Harjosari	Kelurahan
	006. Sukajadi	Kelurahan
	007. Pulau Karam	Kelurahan
	001. Padang Bulan	Kelurahan
	002. Padang Terubuk	Kelurahan
	003. Sago	Kelurahan
	004. Kampung Dalam	Kelurahan
11. Rumbai	005. Kampung Bender	Kelurahan
	006. Kampung Baru	Kelurahan
	001. Umban Sari	Kelurahan
	002. Rumbai Bukit	Kelurahan
	003. Muara Fajar	Kelurahan
12. Rumbai Pesisir	004. Pales	Kelurahan
	005. Sri Meranti	Kelurahan
	001. Meranti Pandak	Kelurahan
	002. Limbungan	Kelurahan
	003. Lembah Sari	Kelurahan
	004. Lembah Damai	Kelurahan
	005. Limbungan Baru	Kelurahan
	006. Tebing Tinggi Okura	Kelurahan

Sumber: Pekanbaru dalam angka 2006 (Kerjasama Bappeda Kota Pekanbaru dengan BPS Kota Pekanbaru).

Sedangkan untuk banyaknya Desa/kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan dalam Kota Pekanbaru untuk tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 4.6. sebagai berikut.

72

Tabel. 4.6.

Banyaknya desa/Kelurahan dan Perangkat desa/kelurahan dalam Kota

Tabel. 4.6.
Banyaknya desa/Kelurahan dan Perangkat desa/kelurahan dalam Kota Pekanbaru Tahun 2005

Kecamatan (1)	Banyaknya Desa/Kelurahan (2)	Perangkat Desa/Kelurahan	
		RW (3)	RT (4)
1. Tampan	4	45	221
2. Payung Sekaki	4	33	155
3. Bukit Raya	4	55	222
4. Marpoyan Damai	5	63	303
5. Tenayan Raya	4	70	284
6. Lima Puluh	4	30	122
7. Sail	3	18	74
8. Pekanbaru Kota	6	42	132
9. Sukajadi	7	38	148
10. Senapelan	6	42	151
11. Rumbai	5	39	176
12. Rumbai Pesisir	6	64	278
Jumlah	58	539	2266

Sumber: Pekanbaru dalam angka 2006 (Kerjasama Bappeda Kota Pekanbaru dengan BPS Kota Pekanbaru).

4. Pengentasan Kemiskinan Kota Pekanbaru.

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi yang telah ditetapkan, beberapa SKPD perlu melakukan koordinasi, diantaranya adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka pengentasan Kemiskinan Kota Pekanbaru, dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Pertanian, Kantor Penyuluhan dan Informasi Pertanian Terpadu (KPIPT), Bagian Ekonomi Sekretariat Kota dan Dinas Kimpraswil.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana berfungsi sebagai leader dalam kegiatan pengentasan kemiskinan, sebagai penyedia data Rumah Tangga Miskin serta melaksanakan kegiatan antara lain dalam bentuk pemberian bantuan bagi Rumah Tangga Miskin. Dinas Koperasi dan UKM akan mengambil peran untuk pertumbuhan usaha kecil, adapun Dinas Perindag akan mengambil peran dalam penumbuhan industri kecil yang berasal dari rumah tangga miskin. Dinas Tenaga Kerja akan melakukan pelatihan bagi anggota keluarga rumah tangga miskin untuk kemudian

dibantu penyalurannya melalui Bursa tenaga kerja, sedangkan Dinas Pertanian dan KPIPT akan melakukan pembinaan bagi rumah tangga miskin yang berkerja sebagai petani dan nelayan. Bagian Ekonomi berperan dalam pembinaan lembaga keuangan ekonomi mikro. Sedangkan Dinas Kimpraswil secara bertahap akan melaksanakan pembangunan rumah layak huni bagi Rumah tangga miskin.

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru yang menurut data Statistik Kota Pekanbaru pada akhir Tahun 2005 telah mencapai 704.517 Jiwa dengan laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 4,31 % pertahun. Pertambahan Jumlah Penduduk tersebut didorong oleh arus migrasi, karena besarnya harapan yang terlihat oleh pendatang terhadap pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru. Dengan jumlah sebesar itu maka kepadatan penduduk Kota Pekanbaru saat ini adalah sebesar 1.139 jiwa/Km². Kepadatan penduduk ini menimbulkan masalah baru terutama dalam pelayanan, pengadaan fasilitas

sosial dan fasilitas umum.

Sebagai salah satu dampak negatif dari pertambahan Jumlah Penduduk adalah terjadinya peningkatan Jumlah Penduduk Miskin. Berdasarkan data pada tabel 4.7 dapat diketahui Jumlah dan Persentase Penduduk/Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru setiap tahunnya juga menyebabkan jumlah keluarga miskin terus bertambah. Pada tahun 2005 Penduduk miskin telah berjumlah 76.841 jiwa atau sekitar 10,91 % dari total jumlah penduduk.

74

Tabel 4.7

Jumlah dan Persentase Penduduk/Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan Tahun 2005

Tabel 4.7
Jumlah dan Persentase Penduduk/Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan
Tahun 2005

KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN	PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Tampan	4	82.294	18.412	3.334	3,73	657	3,62
2. Payung Sekaki	4	87.878	13.898	4.734	6,04	988	6,87
3. Bukit Raya	4	73.703	15.269	5.882	7,97	1.207	7,94
4. Marjan Damai	5	97.276	28.287	7.983	7,81	1.544	7,81
5. Teayan Raya	4	83.210	17.338	14.100	16,95	3.065	17,66
6. Lina Palih	4	43.166	9.388	5.265	12,08	1.098	11,72
7. Sial	3	23.835	5.111	2.211	9,28	487	9,53
8. Pekanbaru Kota	6	28.332	5.784	4.494	15,76	947	14,70
9. Sakajadi	7	47.466	9.024	7.255	15,28	1.558	15,80
10. Senapelan	6	39.894	8.688	5.282	13,55	1.103	12,71
11. Rumbai	5	55.115	11.943	9.394	16,74	1.956	16,38
12. Rumbai Perair	6	55.988	12.587	7.895	13,81	1.652	13,11
JUMLAH	58	704.517	148.232	76.841	10,91	16.158	10,68

Sumber: BPMKB Kota Pekanbaru, Hasil Pendataan Keluarga Kota Pekanbaru, 2006.

Berdasarkan persentase jumlah penduduk (ruta) miskin disetiap kecamatan berbeda-beda di Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan memiliki persentase penduduk miskin terkecil yaitu: 3,62 % atau sebanyak 3.334 jiwa dari 82.294 jiwa penduduk yang ada di kecamatan tersebut. Untuk persentase penduduk (ruta) miskin terbesar ada di kecamatan Teayan Raya yaitu mencapai 17,66 % atau sebanyak 14.100 jiwa dari 83.210 penduduk yang ada di kecamatan tersebut.

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru semestinya menjadi contoh yang baik bagi kota-kota lain di provinsi ini. Namun, sebagai kota yang kini sedang menuju metropolis, berbagai persoalan muncul. Mulai dari maraknya pedagang kaki lima (PKL), kependudukan, kemiskinan, berbagai persoalan pendidikan, kesehatan, hingga persoalan lingkungan.

Pada tahun 2006 sesuai dengan Visi Kota Pekanbaru dan sebagaimana pernyataan dari misi ketiga yaitu: Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, telah dilaksanakan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dilaksanakan oleh BPMKB dimana yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan

75
permodalan bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah, sebagai indikator tujuan ini yaitu persentase kelompok masyarakat miskin yang memiliki usaha yang mendapat bantuan permodalan dari lembaga keuangan. Sasaran yang

ingin dicapai adalah terwujudnya kemitraan usaha dalam rangka penguatan permodalan usaha masyarakat yang termasuk kedalam ketagori masyarakat miskin. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sumber dana berasal dari APBD Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru pada tahun 2006 telah dianggarkan dana P2LEP sejumlah Rp1.000.000.000,- yang dialokasikan untuk 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Muara Fajar dan Kelurahan Umban Sari di Kecamatan Rumbai.

Menurut Mubyarto (1994: 4), yang dimaksud dengan kemiskinan adalah: "Suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan, rendahnya tingkat pendapatan penduduk miskin dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang menyebabkan produktivitas rendah dan meningkatnya beban ketergantungan bagi masyarakat".

1. Uji Validitas dan Reliabilitas.

Sebelum dilakukan penelitian. Hal pertama dilakukan yaitu menguji kevalidan angket yang digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, kemudian dilakukan pengujian terhadap kuesioner untuk mengukur tingkat kebaikan kuesioner, maka kita dapat melakukan analisis validitas dan reliabilitas kuesioner.

Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Tingkat validitas kuesioner diukur berdasarkan koefisien validitas yang dalam hal ini menggunakan koefisien korelasi item-total yang terkoreksi. Menurut Kaplan 102

suatu pertanyaan dikatakan valid dan dapat mengukur variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0,3.

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut.

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: keputusan validitas dan reliabilitas item menggunakan kriteria Kaplan sebagai berikut:

1. Item dinyatakan valid jika koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0.3.

2. Kelompok item dalam suatu dimensi dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitasnya tidak lebih rendah dari 0.7.

Untuk melakukan perhitungan uji validitas dan reliabilitas ini diuji coba terhadap 15 (lima belas) orang responden, dan pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS ver. 13.

Dari hasil Uji Validitas pada instrumen penelitian ini terhadap 15 (lima belas) orang responden, maka semua butir instrumen dalam penelitian ini adalah valid, dan untuk kriteria uji reliabilitas instrumen penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan sudah reliabel, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.35. sebagai berikut:

Tabel 4.35.
Uji Validitas dan Reliabilitas

Varia- bel	Pertanyaan	Koef. Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan	Koef. Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
X	P1	0,807	0,3	Valid	0,963	0,7	Reliabel
	P2	0,665	0,3	Valid			
	P3	0,638	0,3	Valid			
	P4	0,725	0,3	Valid			
	P5	0,644	0,3	Valid			
	P6	0,329	0,3	Valid			
	P7	0,395	0,3	Valid			
	P8	0,458	0,3	Valid			
	P9	0,647	0,3	Valid			
	P10	0,599	0,3	Valid			
	P11	0,725	0,3	Valid			
	P12	0,897	0,3	Valid			
	P13	0,897	0,3	Valid			
	P14	0,866	0,3	Valid			
	P15	0,850	0,3	Valid			
	P16	0,711	0,3	Valid			
	P17	0,745	0,3	Valid			
	P18	0,730	0,3	Valid			
	P19	0,460	0,3	Valid			
	P20	0,383	0,3	Valid			
P21	0,544	0,3	Valid				
P22	0,870	0,3	Valid				
P23	0,627	0,3	Valid				
Y	P24	0,607	0,3	Valid	0,776	0,7	Reliabel
	P25	0,622	0,3	Valid			
	P26	0,717	0,3	Valid			
	P27	0,793	0,3	Valid			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Ver.13